



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

LKjPD

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2023, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD)

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini bermanfaat khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu, Januari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. RIFKI ANANDA MUSTAQIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670727 198603 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Disetiap akhir periode perangkat daerah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran, dengan memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan kinerja tahunan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran. Sehingga hasil pengukuran kinerja dimaksud dilaporkan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD).

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2023. Olehnya berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang terjabar dalam Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan guna mendukung kemandirian fiskal daerah, dengan sasaran:

Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, beberapa program/kegiatan yang menunjang pencapaiannya telah dituangkan di dalam rencana kinerja tahunan. Di tahun 2023 dapat terakomodir 2 (Dua) Program dan 9 Kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :

- 1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 penerimaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan sebesar **Rp 1.356.411.000.000,00** dan dapat direalisasikan sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 1.413.280.142.850,10** atau **104,19 %**

Dengan adanya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2023 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. RIEKLANATA MUSTAQIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670727 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. CASCADING KINERJA.....	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. ISU-ISU STRATEGIS	25
1.4. DUKUNGAN SDM, SARANA DAN PRASARANA	26
1.5. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2022	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	31
2.1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	31
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
2.3. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023.....	33
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	42
2.5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023.....	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1. CAPAIAN KINERJA	47
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023	47
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022	49
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	54
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan	54
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	56
f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	57
3.2. REALISASI ANGGARAN	66
3.3. INOVASI.....	71
3.4. PENGHARGAAN	73
BAB IV PENUTUP	74
- Perjanjian Kinerja (PK)	
- Lain-lain yang Dianggap Perlu	

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 1.1.	Data Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	27
Tabel 1.2.	Data Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	27
Tabel 1.3.	Data Total Pegawai Negeri Sipil Pada Badan dan Unit Pelaksana (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	27
Tabel 1.4.	Data Sarana dan Prasarana Pada Badan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28
Tabel 1.5.	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	30
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	31
Tabel 2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	32
Tabel 2.3.	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	36
Tabel 2.4.	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	41
Tabel 2.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026	42
Tabel 2.6.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	43
Tabel 2.7.	Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	45

Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 3.1.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	48
Tabel 3.2.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	48
Tabel 3.3.	Realisasi Penerimaan Daerah	49
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi PAD	51
Tabel 3.5.	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun	53
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Di Renstra	54
Tabel 3.7.	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran	57
Tabel 3.8.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	58
Tabel 3.9.	Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Sumber Dana APBD	67

DAFTAR GAMBAR

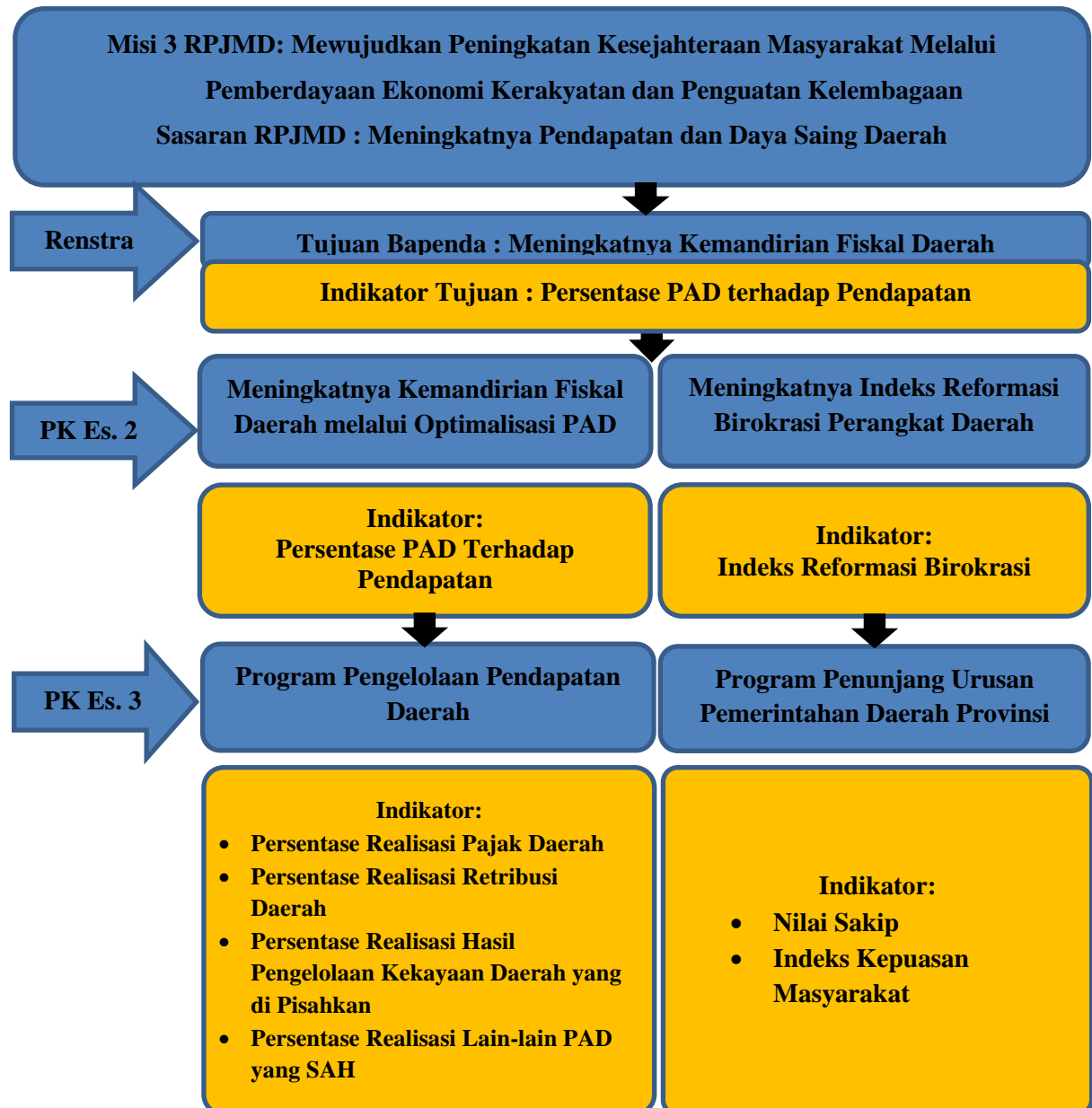
Gambar	Uraian	Hal.
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	19
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. CASCADING KINERJA

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. diuraikan dalam cascading Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Adapun Cascading Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH



1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. SUSUNAN ORGANISASI :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi:
 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah membawahi:
 1. Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Infrastruktur; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahi:
 1. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam penyelenggaraan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Daerah;

III. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.

Dalam penyelenggaraan tugas sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Badan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

IV. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan program rencana kegiatan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- b. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pelayanan Pajak Daerah, Pelayanan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- c. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pendapatan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- d. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain ;
- e. penyiapan pedoman dan standar pelayanan, pendaftaran pada pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- f. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- g. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- h. penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- i. penyusunan target dan realisasi penerimaan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan

m. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengelolaan Pajak membawahi:

1. Sub Bidang Pajak Daerah

Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Pajak Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pajak Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pajak Daerah ;
- b. memfasilitasi Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendataan dan penilaian Pajak Daerah;
- c. melaksanakan Penelitian dan verifikasi Data pelaporan Pajak Daerah;
- d. melaksanakan Pendataan Objek Pajak Daerah;
- e. melaksanakan Pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- f. melaksanakan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- g. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pemungutan pajak daerah;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan optimalisasi penerimaan PKB, BBN-KB, PAP, PAB dan opsen MBLB;
- i. menghimpun dan membuat laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan Pajak daerah serta pengembangannya;
- j. melaksanakan Penyusunan NJKB Pajak Daerah;
- k. melaksanakan pengawalan dan penghitungan terhadap pelaksanaan PBB-KB, PAJAK ROKOK dan Opsen Pajak MBLB;
- l. melakukan penghitungan dan penetapan target setiap tahun dan penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan seluruh UPT pendapatan setiap bulan ;
- m. melakukan dan menetapkan penghitungan target, lebih salur dan kurang salur atas DBH pajak daerah bagian kabupaten/Kota;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah.

2. Sub. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

Uraian tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain meliputi:

- a. melakukan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- b. melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain dengan perangkat daerah pemungut dan instansi terkait lainnya;
- c. menyusun data potensi, mengusulkan perubahan tarif dan mengkoordinasikan rencana target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- d. menginventarisasi sumber penerimaan lainnya;
- e. melakukan Pendataan dan pendaftaran objek Retribusi daerah;
- f. melakukan Pengelolaan data Retribusi daerah;
- g. melakukan Penetapan wajib Retribusi daerah dan Pengelolaan retribusi daerah;
- h. melaporkan Pengelolaan Retribusi daerah;
- i. melaksanakan Sosialisasi dan konsultasi kebijakan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
- j. menghimpun usulan target penerimaan dan membuat laporan Realisasi penerimaan Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
- k. menyusun petunjuk pelaksanaan teknis pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain serta penerimaan pendapatan hibah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.

V. BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengelolaan sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan sistim dan jaringan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program teknis operasional dia bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi ;
- b. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi di bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan Retribusi daerah serta memberikan analisa regulasi pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- e. pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- f. pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak ;
- g. pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada SKPD;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal; pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pelaporan Data dan Informasi dan Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi;
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- l. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah membawahi:

1. Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi

Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Pelaporan Data dan Informasi.

Uraian tugas Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan pelayanan dan sistem informasi Pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis ternologi pada pelaporan data dan Informasi;
- c. melakukan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak
- d. melakukan pengolahan dan pemeliharaan sistem jaringan dan server jaringan;
- e. menyusun dan merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi Pajak daerah dan retribusi daerah pada pelaporan data dan Informasi;
- f. melakukan penyiapan, pengelolaan, pengembangan data dan informasi, pemeliharaan, pembinaan dan koordinasi dengan UPT Badan dan Unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan pelaporan data dan informasi;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang bidang teknologi dan sistem informasi pada pelaporan data dan informasi;
- h. membuat laporan, mengelola dan menganalisis serta mendokumentasikan data pendapatan daerah untuk disajikan dalam bentuk format laporan maupun bentuk informasi lainnya;
- i. melakukan Kerjasama dengan penyedia jasa (provider) telekomunikasi dan teknologi informasi;
- j. melakukan pengolahan data objek dan subjek pajak untuk verifikasi dan validasi data, baik secara administrasi maupun penelitian lapangan dan menyajikannya dalam berita acara;
- k. mengkoordinasikan hasil validasi data objek dan subjek pajak dengan pihak-pihak terkait dalam rangka updating data;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi.

2. Sub. Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi

Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur, jaringan dan pengembangan sistem Informasi.

Uraian tugas Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi;
- b. melakukan pengembangan sistem informasi Pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta perencanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah meliputi pengolahan data elektronik, dan penyajian informasi Publik;
- c. melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi di setiap UPT Badan dan Unit kerja terkait dengan pelaksanaan infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi, verifikasi, validasi objek dan subjek data;
- d. menyiapkan Pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. menangani laporan pengaduan dan mengkoordinasikan serta menindaklanjuti pemecahan masalah yang berkaitan dengan teknologi sistem informasi dan pengolahan data;
- f. melakukan inventarisasi, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan aplikasi;
- g. melakukan koordinasi pengamanan sistem database dan pemutakhiran database dengan menggunakan data yang bersumber dari Sub Bidang Pelaporan data dan Informasi;
- h. melakukan backup database pada data center dan pengecekan terhadap backup database pada setiap UPT Badan;
- i. melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan arus data, integrasi data, pertukaran informasi dan instansi terkait;

- j. membuat strategi pengelolaan perangkat lunak aplikasi yang holistic spesifikasi dan struktur dari sistem basis data, terpadu dan terintegrasi;
- k. mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- m. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi.

VI. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah dan Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis dan melakukan analisis regulasi dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan Retribusi daerah, dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam bidang Perencanaan dan penetapan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;

- g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi pada bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan Retribusi bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- k. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, dan Pengolahan Data membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan penetapan pendapatan daerah;
- c. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. menyusun perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
- e. menyusun perencanaan dan inovasi dalam rangka pengembangan potensi Pajak daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain
- f. menyusun perencanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota terkait optimalisasi penerimaan DBH Pajak Daerah dan optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Daerah;
- g. menyusun Perencanaan kegiatan sinergitas pemungutan opsen Pajak Daerah;
- h. melakukan Konsultasi kebijakan Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah;

- i. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan target dan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah setiap triwulan dan tahunan;
- j. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Penetapan Pendapatan dengan pihak dan unit terkait;
- k. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan Retribusi daerah;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.

2. Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah ;
- b. melakukan penggalian dan pemetaan potensi pendapatan yang menjadi sumber pendapatan daerah;
- c. melakukan intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah;
- d. melakukan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kebijakan Pajak daerah;
- e. melakukan Analisa dan Pengembangan Retribusi daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;
- f. melakukan Analisa dan pengembangan Pendapatan lain-lain serta penyusunan kebijakan Pendapatan Lain-lain;
- g. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat; Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data;

- h. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pendapatan lain-lain kepada masyarakat;
- i. menyiapkan bahan evaluasi/Fasilitasi rancangan peraturan daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain;
- j. melakukan koordinasi, konsultasi pengembangan potensi dengan instansi terkait dan menyusun Produk Hukum Daerah di bidang pendapatan daerah;
- k. menyusun dan merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- l. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi dan penataan kerjasama yang terkait dengan Pendapatan daerah;
- m. merumuskan dan menyusun standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat.

VII. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas Pelaksanaan perumusan kebijakan, Pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem administrasi pelayanan Pendapatan Daerah.

Dalam penyelenggaraan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program teknis operasional pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi intensifikasi Pajak daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur Pajak daerah dan Retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;

- d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan Pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- f. pengendalian dan Evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah dan Retribusi daerah kepada masyarakat pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- g. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan Retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan Pemeriksaan pajak daerah dan Retribusi daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah pada bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah dan Pengendalian sistem Administrasi pelayanan pendapatan daerah;
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- m. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahi:

1. Sub. Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja kegiatan sub bidang pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pengendalian pemeriksaan, monitoring dan Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- c. melaksanakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- d. melaksanakan pemeriksaan pelayanan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain lainlain;
- e. melaksanakan monitoring, sinkronisasi regulasi pendapatan dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- g. melakukan pemeriksaan pemungutan pajak daerah dan Retribusi daerah;
- h. melakukan pembinaan, pengendalian dan pemeriksaan menyangkut keuangan, aset dan personil pada lingkup Badan Pendapatan Daerah dan UPT Badan;
- i. menindaklanjuti hasil temuan internal dan eksternal laporan wajib pajak dan aduan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan, pengawasan dan pengendalian sistim Administrasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas bidang Pengendalian sistem administrasi pelayanan Pendapatan Daerah.

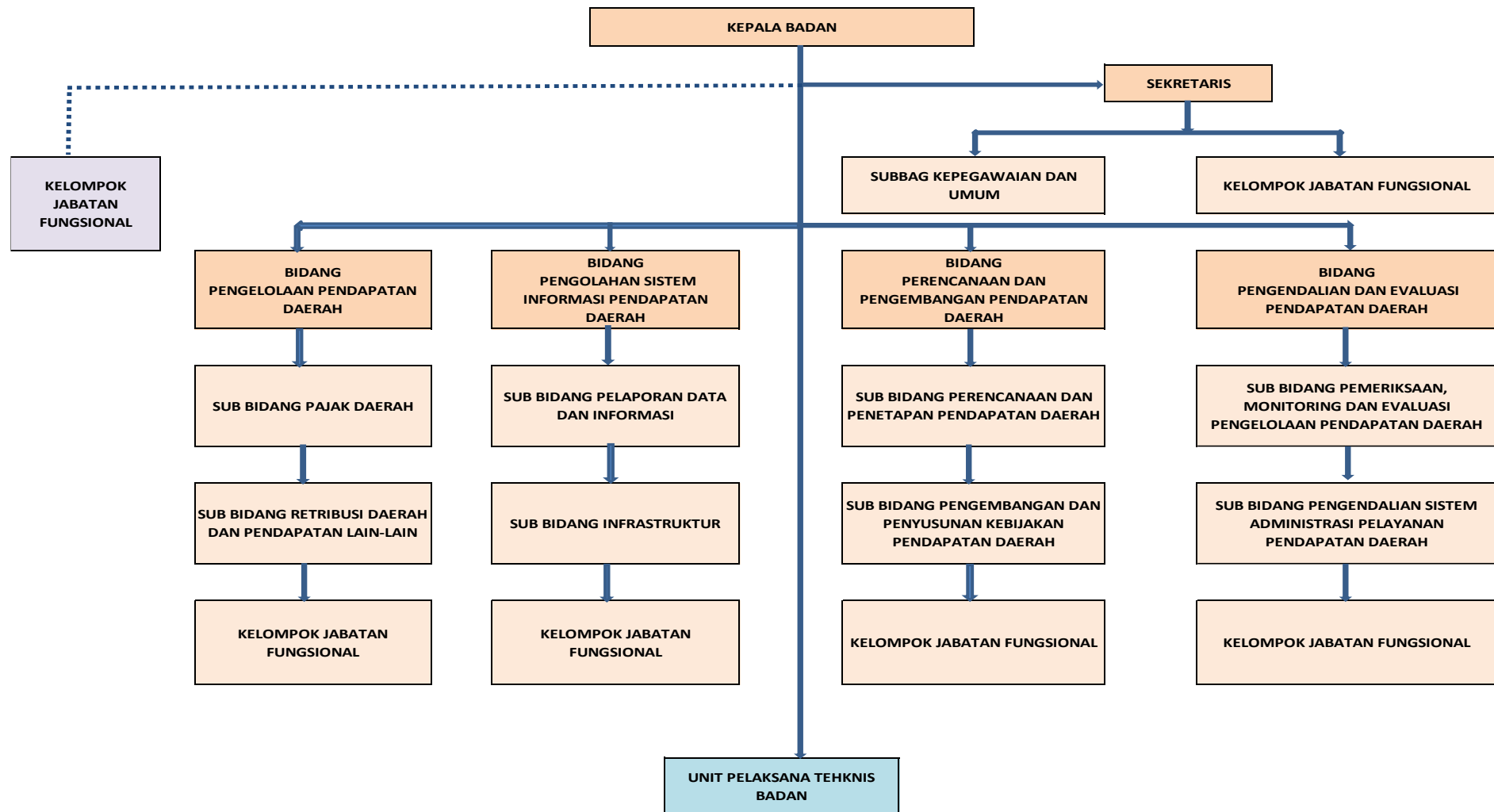
Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah pada bidang Pengendalian sistim Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c. melakukan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi daerah;
- d. melakukan pengendalian, evaluasi dan pembinaan teknis sistim administrasi atas distribusi dan penggunaan dokumen pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pengendalian sistem administrasi pelayanan Pendapatan daerah yang berbasis teknologi;
- f. melakukan pengendalian dan pengawasan serta pembinaan sistim administrasi terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- h. merumuskan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
- i. melakukan kerjasama dengan unit terkait dalam rangka efektifnya pelaksanaan kegiatan pengendalian pengawasan dan monitoring;
- j. melakukan Pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- k. melakukan pemberdayaan tugas dan fungsi PPNS dalam rangka penegakan hukum/ pengendalian pemungutan.

- l. meneliti kebenaran tata cara penggunaan dan pengisian dokumen administrasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



VIII. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, maka UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. UPT Pendapatan Wilayah I Kota Palu;
2. UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong;
3. UPT Pendapatan Wilayah III Poso;
4. UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali;
5. UPT Pendapatan Wilayah V Banggai;
6. UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan;
7. UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli;
8. UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol;
9. UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Unauna;
10. UPT Pendapatan Wilayah X Banawa;
11. UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi;
12. UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara;
13. UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut.

Dalam pelaksanaannya UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara dan UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut masih dalam proses pembentukan. UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga dibantu oleh 7 (tujuh) Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu dan 2 (dua) SAMSAT Corner, yaitu:

1. UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kotaraya;
2. UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kolonodale;
3. UPT Pendapatan Wilayah V Banggai Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Toili;
4. UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Salakan;
5. UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Lempe;
dan
6. UPT Pendapatan Wilayah X Donggala Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Tompe;

7. SAMSAT Point Wani
8. SAMSAT Corner Thamrin
9. SAMSAT Corner Songgolangi

UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan, pelaksanaan kebijakan penetapan, penagihan dalam pelayanan pemungutan pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat dan opsen Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas UPT Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebijakan dan operasional teknis, penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya;
- b. pendistribusian tugas dan petunjuk teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya;
- c. penyelenggaraan teknis operasional penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya;
- d. pelaksanaan evaluasi tugas penatausahaan penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya
- e. pelaksanaan koordinasi koordinasi dengan Instansi teknis lainnya
- f. penataan pelaksanaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor dan opsen Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan bersama Kabupaten/Kota
- g. pelaporan pelaksanaan penetapan, penagihan dan pelayanan pajak daerah yang menjadi kewenangannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang

meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a. Mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan kerja Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Usaha;
- c. Melakukan pendataan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menatausahakan kegiatan umum administrasi dan keuangan perkantoran UPT Pendapatan meliputi DUK, absen, surat teguran, penggajian, Askes, Taspen, KARIS/KARSU, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- e. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pendapatan;
- f. Membimbing Bendahara Khusus Penerimaan, Pengeluaran meliputi pembuatan Buku Kas Umum, penerimaan kasir dan sebagainya serta bendahara/Pengelola Barang;
- g. Membimbing dan mengelola pelaksanaan belanja UPT Pendapatan meliputi perencanaan kebutuhan dana pemeliharaan dan operasional serta penertiban SPPD dan tertib pencatatan belanja dalam BKU;
- h. Membuat laporan penerimaan Pajak Daerah secara umum;
- i. Membuat laporan material dan non material;
- j. Melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan asset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, dan
- l. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pendapatan.

b. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Seksi PKB dan BBN-KB, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan ,penetapan, penagihan, pemungutan, serta koordinasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Uraian tugas Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB meliputi:

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi PKB dan BBN-KB;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Melaksanakan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Melaksanakan proses penerimaan pendapatan daerah melalui mekanisme Samsat;
- e. Melaksanakan penagihan pajak daerah
- f. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
- g. Melakukan sosialisasi terkait pajak daerah;
- h. Melaksanakan proses keberatan dan permintaan / permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor serta membuat pembukuan dan pelaporan;
- i. Melaksanakan proses Surat Keterangan Fiskal bagi Kendaraan Mutasi Keluar Daerah Provinsi maupun Dalam Daerah Provinsi, serta membuat pembukuan dan pelaporan;
- j. Membuat laporan Penerimaan Pajak Daerah melalui mekanisme kesamsatan;
- k. Melaksanakan proses permohonan peralihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, warna dan fungsi;
- l. Melaksanakan proses permohonan perubahan dari plat dasar pribadi/hitam ke plat dasar umum/kuning dan sebaliknya;
- m. Melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- n. Mengoptimalkan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui kerjasama dengan Kabupaten/Kota
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- p. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

c. Seksi Penetapan dan Penagihan

Seksi Penetapan dan Penagihan, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan Pajak Daerah dalam pendataan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan di

luar kesamsatan yaitu Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah kerjanya.

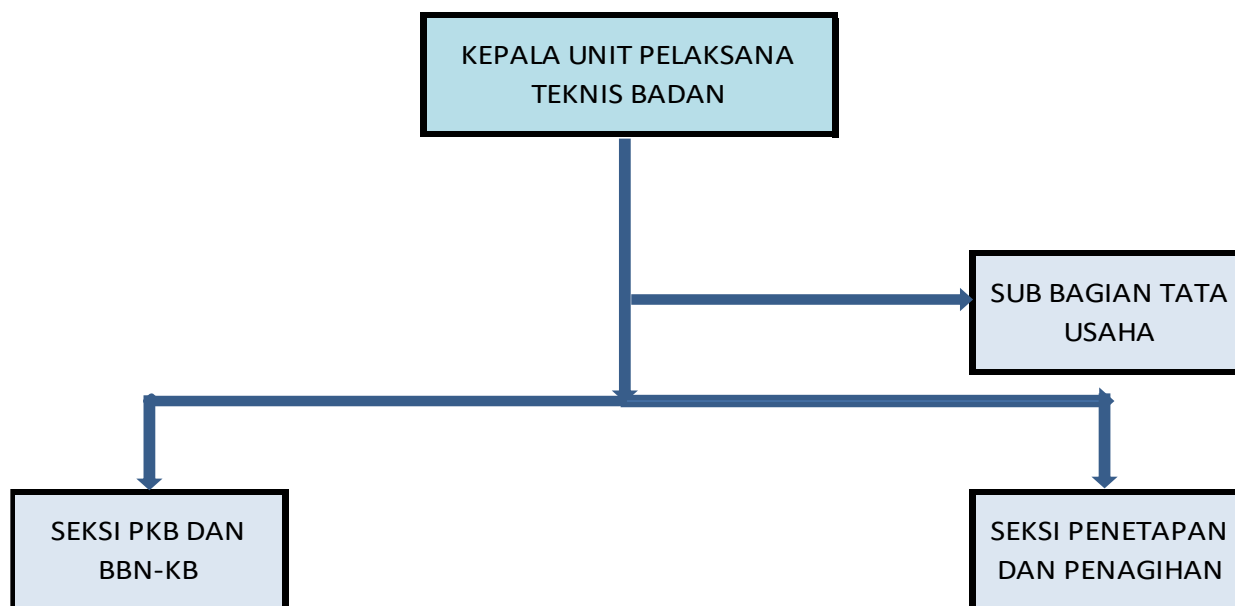
Uraian tugas Seksi Penetapan dan Penagihan meliputi:

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penetapan dan Penagihan;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang Penetapan dan Penagihan Pajak;
- c. Melakukan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah;
- d. Melaksanakan penagihan pajak daerah;
- e. Melakukan penetapan wajib pajak daerah;
- f. Melakukan sosialisasi pajak daerah;
- g. Menyampaikan SKPD, SKPDLB, SKPDKB, SSPD, STPD, PAP dan PAB;
- h. Melakukan kerjasama dengan Bapenda Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- i. Melaksanakan proses keberatan, keringanan, pengurangan dan penghapusan pajak yang menjadi target UPT Badan Pendapatan selain Pajak Kendaraan Bermotor / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- j. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bersama Kabupaten/Kota;
- k. Melakukan Penataan Kendaraan dinas di lingkungan wilayah kerjanya;
- l. Membuat laporan data potensi, penertiban SKPD, SSPD dan seluirun penerimaan pajak (kecuali Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pajak daerah diluar kesamsatan yang sesuai kewengana UPT Pendapatan berdasarkan ketentuan pajak dan perturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penagihan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah



1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis yang menyangkut pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan persoalan yang menjadi beban dan tanggung-jawab yang diemban pada periode lima tahun sebelumnya dan yang akan datang dan memiliki dampak jangka panjang dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga hal tersebut perlu untuk diatasi secara bertahap. Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan dihadapi pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD.

Adapun isu-isu strategi hasil diidentifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi dalam pengelolaan pendapatan;

- b. Peningkatan fasilitasi pelayanan pendapatan yang memadai kepada masyarakat;
- c. Peningkatan penyelenggaraan penegelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA DAN PRASARANA

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 268 orang yang tersebar di BAPENDA Provinsi, UPT BAPENDA, Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, dan SAMSAT Outlet dan Corner.

Sumber Daya Aparatur pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dan pada UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Negeri Sipil Pada BAPENDA

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 44 Orang
2	GOL. II = 14 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 44 Orang
3	GOL. III = 63 Orang	SLTA = 20 Orang	
4	GOL. IV = 11 Orang	D 3 = 3 Orang	
5		S 1 = 47 Orang	
6		S 2 = 18 Orang	
	JUMLAH = 88 Orang	JUMLAH = 88 Orang	JUMLAH = 88 Orang

Tabel 1.2
Data Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 103 Orang
2	GOL. II = 52 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 77 Orang
3	GOL. III = 109 Orang	SLTA = 58 Orang	
4	GOL. IV = 19 Orang	D 3 = 1 Orang	
5		S 1 = 96 Orang	
6		S 2 = 25 Orang	
	JUMLAH = 180 Orang	JUMLAH = 180 Orang	JUMLAH = 180 Orang

Tabel 1.3
Data Total Pegawai Negeri Sipil
Pada BAPENDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 147 Orang
2	GOL. II = 66 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 121 Orang
3	GOL. III = 172 Orang	SLTA = 78 Orang	
4	GOL. IV = 30 Orang	D 3 = 4 Orang	
5		S 1 = 143 Orang	
6		S 2 = 43 Orang	
	JUMLAH = 268 Orang	JUMLAH = 268 Orang	JUMLAH = 268 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dan UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, tersaji pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Pada BAPENDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	STATUS
1	2	3	4
1	Gedung Kantor Badan	1 Unit	Milik
2	Gedung Kantor UPT Pendapatan		
	a. UPT Pendapatan Wil I Kota Palu	1 Unit	Milik
	b. UPT Pendapatan Wil II Parigi Moutong	1 Unit	Milik
	c. UPT Pendapatan Wil III Poso	1 Unit	Milik
	d. UPT Pendapatan Wil IV Morowali	1 Unit	Milik
	e. UPT Pendapatan Wil V Banggai	1 Unit	Milik
	f. UPT Pendapatan Wil VI Banggai Kepulauan	1 Unit	Milik
	g. UPT Pendapatan Wil VII Tolitoli	1 Unit	Milik
	h. UPT Pendapatan Wil VIII Buol	1 Unit	Milik
	i. UPT Pendapatan Wil IX Tojo Una-Una	1 Unit	Milik
	j. UPT Pendapatan Wil X Donggala	1 Unit	Milik
	k. UPT Pendapatan Wil XI Sigi	1 Unit	Milik
3	Gedung Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu		
	a. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kotaraya	1 Unit	Milik
	b. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kolonedale	1 Unit	Pinjam Pakai
	c. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Toili	1 Unit	Sewa
	d. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Salakan	1 Unit	Sewa
	e. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Bangkir (Lempe)	1 Unit	Milik
	f. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Tompe	1 Unit	Milik
	g. SAMSAT Outlet Mall Pelayanan Publik	1 Unit	Pinjam Pakai
	h. SAMSAT Corner Thamrin	1 Unit	Pinjam Pakai
	i. SAMSAT Corner Songgolangi	1 Unit	Pinjam Pakai
	j. SAMSAT Point Wani	1 Unit	Sewa
4	Kendaraan Khusus Pelayanan SAMSAT Keliling	13 Unit	Milik
5	Kendaraan Operasional Roda 4	42 Unit	Milik
6	Kendaraan Operasional Roda 2	167 Unit	Milik

1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2022

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Tugas Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 094/108/ITDA tanggal 3 April 2023, telah dilakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- b. Menilai Tingkat Implementasi SAKIP
- c. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kerja (RENJA), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari **0 %** s.d **100 %**. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memperoleh nilai sebesar **75,40 %**, sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh Kementrian PAN dan RB termasuk dalam kategori **Sangat Baik (BB)**. Hal ini menunjukkan bahwa komponen Sistem AKIP yang ada sudah baik, namun sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan masih perlu sedikit perbaikan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor :

700.1.2.1/289.2//E-SAKIP/PROV/VII/2023 Tanggal : 14 Juli 2023 oleh Inspektorat Daerah, maka hasil tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5

Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1	2	3
1.	Melakukan perbaikan penyusunan rencana kinerja Tahun 2022 dengan menyesuaikan halaman sesuai dengan penempatan sub babnya.	Telah dilakukan perbaikan penyusunan rencana kinerja dengan menyesuaikan halaman sesuai penempatan sub babnya.
2.	Isu-isu strategis dalam Renja Tahun 2022 haruslah merupakan isu-isu strategis pada Renstra	Isu-isu strategis dalam Renja Tahun 2022 sudah merupakan isu-isu strategis pada Renstra.
3.	Target Kinerja dalam Renja dan dalam DPA tidak sesuai, bahkan terdapat target yang didanai melebihi target capaian akhir renstra pada program penunjang urusan pemerintahan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Maka dari itu apabila terjadi perubahan RPJMD segera lakukan perbaikan capaian target dalam Renstra OPD sesuaikan dengan kebutuhan bersifat efektif dan efisien	Telah disesuaikan Target Kinerja dalam Renja dan dalam DPA.
4.	Menyusun Tabel Pengukuran Kinerja.	Telah menyusun tabel pengukuran Kinerja.
5.	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja penghasilan.
6.	Segera merapihkan LKjIP dengan menjilid dokumen tersebut setelah selesai disusun.	LkjIP telah di jilid.
7.	Segera Menyusun Indikator Kinerja Individu.	Telah disusun Indikator Kinerja Individu.
8.	Laporan Kinerja dilakukan sebaiknya pertriwulan dan direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah.	Telah dilakukan reviu Laporan Kinerja pertriwulan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Penetapan rumusan Tujuan Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Misi Ketiga kepala daerah terpilih, yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”** dengan rumusan tujuan terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan guna mendukung kemandirian fiskal daerah, dengan sasaran; meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Indikator

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rincian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju
Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Meningkatkan Manajemen Sumber Penerimaan Daerah	a. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah (Pajak dan Retribusi) b. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah c. Inventarisasi Sumber Penerimaan Daerah Lainnya

Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan visi pembangunan yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” adalah untuk mendukung Misi ke - 3.

Misi ke - 3 yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan, dengan strategi :

- Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah

Adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah Pajak dan Retribusi
- Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Inventarisasi Sumber Penerimaan Daerah Lainnya.

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Program dan Kegiatan berdasarkan unit kerja di BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

A. Badan Pendapatan Daerah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Penetapan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapam Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penagihan Pajak Daerah

Adapun uraian Struktur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.179.324.515,00	4.002.691.215,00	823.366.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.179.324.515,00	4.002.691.215,00	823.366.700,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.179.324.515,00	4.002.691.215,00	823.366.700,00
		- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	605.552.850,00	677.196.850,00	71.644.000,00
		- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	367.769.000,00	411.769.000,00	44.000.000,00
		- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	576.523.650,00	885.890.350,00	309.366.700,00
		- Penetapan Wajib Pajak Daerah	561.105.350,00	673.831.350,00	112.726.000,00
		- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	262.362.800,00	387.992.800,00	125.630.000,00
		- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	385.284.675,00	435.284.675,00	50.000.000,00
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	420.726.190,00	530.726.190,00	110.000.000,00		
2	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah I Palu	639.577.350,00	1.157.115.550,00	517.538.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	639.577.350,00	1.157.115.550,00	517.538.200,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	639.577.350,00	1.157.115.550,00	517.538.200,00
		- Penagihan Pajak Daerah	639.577.350,00	1.157.115.550,00	517.538.200,00
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong	469.984.467,00	549.884.467,00	79.900.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	469.984.467,00	549.884.467,00	79.900.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	469.984.467,00	549.884.467,00	79.900.000,00
		- Penagihan Pajak Daerah	469.984.467,00	549.884.467,00	79.900.000,00
4	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah III Poso	505.634.267,00	616.621.217,00	110.986.950,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	505.634.267,00	616.621.217,00	110.986.950,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	505.634.267,00	616.621.217,00	110.986.950,00
		- Penagihan Pajak Daerah	505.634.267,00	616.621.217,00	110.986.950,00
5	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali	477.486.000,00	552.485.850,00	74.999.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	477.486.000,00	552.485.850,00	74.999.850,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	477.486.000,00	552.485.850,00	74.999.850,00
		- Penagihan Pajak Daerah	477.486.000,00	552.485.850,00	74.999.850,00

1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah V Banggai	520.442.962,00	612.778.965,00	92.336.003,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	520.442.962,00	612.778.965,00	92.336.003,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	520.442.962,00	612.778.965,00	92.336.003,00
		- Penagihan Pajak Daeah	520.442.962,00	612.778.965,00	92.336.003,00
7	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan	596.550.067,00	768.900.067,00	172.350.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	596.550.067,00	768.900.067,00	172.350.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	596.550.067,00	768.900.067,00	172.350.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	596.550.067,00	768.900.067,00	172.350.000,00
8	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli	517.947.000,00	634.409.264,00	116.462.264,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	517.947.000,00	634.409.264,00	116.462.264,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	517.947.000,00	634.409.264,00	116.462.264,00
		- Penagihan Pajak Daeah	517.947.000,00	634.409.264,00	116.462.264,00
9	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol	402.202.800,00	485.702.800,00	83.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	402.202.800,00	485.702.800,00	83.500.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	402.202.800,00	485.702.800,00	83.500.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	402.202.800,00	485.702.800,00	83.500.000,00
10	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-una	527.893.800,00	652.460.800,00	124.567.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	527.893.800,00	652.460.800,00	124.567.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	527.893.800,00	652.460.800,00	124.567.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	527.893.800,00	652.460.800,00	124.567.000,00
11	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah X Donggala	278.905.900,00	425.389.054,00	146.483.154,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	278.905.900,00	425.389.054,00	146.483.154,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	278.905.900,00	425.389.054,00	146.483.154,00
		- Penagihan Pajak Daeah	278.905.900,00	425.389.054,00	146.483.154,00
12	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi	305.520.000,00	431.260.000,00	125.740.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	305.520.000,00	431.260.000,00	125.740.000,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	305.520.000,00	431.260.000,00	125.740.000,00
		- Penagihan Pajak Daeah	305.520.000,00	431.260.000,00	125.740.000,00

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	77.324.053.660,00	86.349.842.606,00	9.025.788.946,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	77.324.053.660,00	86.349.842.606,00	9.025.788.946,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.661.665.976,00	3.931.605.791,00	269.939.815,00
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	826.122.456,00	926.122.456,00	100.000.000,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.835.543.520,00	3.005.483.335,00	169.939.815,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.404.795.996,00	58.418.119.684,00	4.013.323.688,00
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.404.795.996,00	58.418.119.684,00	4.013.323.688,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	758.019.160,00	676.348.385,00	(81.670.775,00)
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	206.812.150,00	174.981.050,00	(31.831.100,00)
	- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan	232.416.550,00	307.416.325,00	74.999.775,00
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	314.575,00	314.575,00	-
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	368.995.465,00	301.600.032,00	(67.395.433,00)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.386.867.550,00	1.946.887.162,00	560.019.612,00
	- Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	785.292.400,00	979.377.300,00	194.084.900,00
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	164.941.000,00	295.855.713,00	130.914.713,00
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	436.634.150,00	671.654.149,00	235.019.999,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.269.439.765,00	3.309.758.123,00	2.040.318.358,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.396.092,00	276.509.600,00	148.113.508,00
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	494.170.800,00	2.069.105.700,00	1.574.934.900,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	646.872.873,00	964.142.823,00	317.269.950,00
	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.584.458.727,00	12.615.849.977,00	6.031.391.250,00
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	627.730.607,00	627.730.607,00	-
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.956.728.120,00	11.988.119.370,00	6.031.391.250,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.693.955.086,00	3.786.422.084,00	(3.907.533.002,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.693.955.086,00	3.786.422.084,00	(3.907.533.002,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.564.851.400,00	1.664.851.400,00	100.000.000,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	49.501.400,00	49.501.400,00	-
	- Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

1	2	3	4	5
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	718.200.000,00	793.200.000,00	75.000.000,00
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	797.150.000,00	822.150.000,00	25.000.000,00
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu	2.474.351.547,00	3.383.951.227,00	909.599.680,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.834.774.197,00	2.226.835.677,00	392.061.480,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.070.951.270,00	1.232.304.750,00	161.353.480,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.070.951.270,00	1.232.304.750,00	161.353.480,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.003.627,00	750.831.627,00	165.828.000,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	585.003.627,00	750.831.627,00	165.828.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.819.200,00	243.699.300,00	64.880.100,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178.819.200,00	243.699.300,00	64.880.100,00
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong	1.477.211.162,00	1.577.211.162,00	100.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.007.226.695,00	1.027.326.695,00	20.100.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.125.261,00	134.125.261,00	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.125.261,00	134.125.261,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.731.934,00	761.931.934,00	(10.800.000,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	772.731.934,00	761.931.934,00	(10.800.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.369.500,00	131.269.500,00	30.900.000,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.369.500,00	131.269.500,00	30.900.000,00
4	UPT Pendapatan Wilayah III Poso	1.145.639.651,00	1.245.639.651,00	100.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	640.005.384,00	629.018.434,00	(10.986.950,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.625.384,00	196.603.334,00	11.977.950,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.625.384,00	196.603.334,00	11.977.950,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.731.934,00	761.931.934,00	(10.800.000,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	772.731.934,00	761.931.934,00	(10.800.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.369.500,00	131.269.500,00	30.900.000,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.369.500,00	131.269.500,00	30.900.000,00
5	UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali	938.951.918,00	1.013.951.768,00	74.999.850,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	461.465.918,00	461.465.918,00	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.202.967,00	60.202.967,00	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.202.967,00	60.202.967,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.818.331,00	324.818.331,00	-
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	324.818.331,00	324.818.331,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.444.620,00	76.444.620,00	-
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.444.620,00	76.444.620,00	-

1	2	3	4	5
6	UPT Pendapatan Wilayah V Banggai	1.378.523.303,00	1.482.573.303,00	104.050.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	858.080.341,00	869.794.338,00	11.713.997,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.953.310,00	175.817.307,00	17.863.997,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.953.310,00	175.817.307,00	17.863.997,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.788.681,00	613.638.681,00	(6.150.000,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	619.788.681,00	613.638.681,00	(6.150.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.338.350,00	80.338.350,00	-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.338.350,00	80.338.350,00	-	
7	UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan	1.025.963.701,00	1.184.813.701,00	158.850.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	429.413.634,00	415.913.634,00	(13.500.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.417.764,00	48.417.764,00	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.417.764,00	48.417.764,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.185.870,00	299.685.870,00	(13.500.000,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	313.185.870,00	299.685.870,00	(13.500.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.810.000,00	67.810.000,00	-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.810.000,00	67.810.000,00	-	
8	UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-Toli	1.155.931.535,00	1.305.931.535,00	150.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	637.984.535,00	671.522.271,00	33.537.736,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.731.020,00	190.398.020,00	34.667.000,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.731.020,00	190.398.020,00	34.667.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.445.598,00	303.694.251,00	(8.751.347,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.445.598,00	303.694.251,00	(8.751.347,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.807.917,00	177.430.000,00	7.622.083,00
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.807.917,00	177.430.000,00	7.622.083,00	
9	UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol	723.332.897,00	798.332.897,00	75.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	321.130.097,00	312.630.097,00	(8.500.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.933.724,00	186.933.724,00	-
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.933.724,00	186.933.724,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.427.873,00	87.927.873,00	(8.500.000,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.427.873,00	87.927.873,00	(8.500.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.768.500,00	37.768.500,00	-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.768.500,00	37.768.500,00	-	
10	UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-Una	1.040.275.024,00	1.165.275.024,00	125.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	512.381.224,00	512.814.224,00	433.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.716.224,00	127.949.224,00	5.233.000,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.716.224,00	127.949.224,00	5.233.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.800.000,00	264.000.000,00	(4.800.000,00)
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.800.000,00	264.000.000,00	(4.800.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.865.000,00	120.865.000,00	-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.865.000,00	120.865.000,00	-	

1	2	3	4	5
11	UPT Pendapatan Wilayah X Donggala	1.001.635.623,00	1.151.635.631,00	150.000.008,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	722.729.723,00	726.246.577,00	3.516.854,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.372.650,00	448.522.650,00	1.150.000,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.372.650,00	448.522.650,00	1.150.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.607.073,00	155.473.927,00	(7.133.146,00)
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.607.073,00	155.473.927,00	(7.133.146,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.750.000,00	122.250.000,00	9.500.000,00
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.750.000,00	122.250.000,00	9.500.000,00
12	UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi	1.309.001.460,00	1.384.001.350,00	74.999.890,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.003.481.460,00	952.741.350,00	(50.740.110,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.183.200,00	215.979.600,00	(136.203.600,00)
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	352.183.200,00	215.979.600,00	(136.203.600,00)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.898.260,00	674.031.750,00	79.133.490,00
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	594.898.260,00	674.031.750,00	79.133.490,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.400.000,00	62.730.000,00	6.330.000,00
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.400.000,00	62.730.000,00	6.330.000,00

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	30,47	30,57	31,30	32,04	32,78

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ <p>Indikator sasaran bertujuan mengukur kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan kinerja penerimaan PAD</p>	Laporan Realisasi Pajak Daerah, dan Laporan Realisasi Bukan Pajak dan DBH Pusat Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

2.5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang bersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan program kegiatan dalam RENSTRA Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran - sasaran yang akan mempercepat terwujudnya Misi Badan Pendapatan.

Adapun sasaran utama Indikator Kinerja yang diharapkan terwujud untuk tahun 2023 terlihat pada format Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan (PK)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	30, 57 %

Sumber Dana APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Badan Pendapatan	Rp. 90.352.533.821,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 86.349.842.606,00	
	- Program pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.002.691.215,00	
2.	UPT Pendapatan Wilayah I Palu	Rp. 3.383.951.227,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 2.226.835.677,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.157.115.550,00	
3.	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong	Rp. 1.577.211.162,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.027.326.695,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 549.884.467,00	
4.	UPT Pendapatan Wilayah III Poso	Rp. 1.245.639.651,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 629.018.434,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 616.621.217,00	
5.	UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali	Rp. 1.013.951.768,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 461.465.918,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 552.485.850,00	

1	2	3	4
6.	UPT Pendapatan Wilayah V Banggai	Rp. 1.482.573.303,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 869.794.338,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 612.778.965,00	
7.	UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan	Rp. 1.184.813.701,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 415.013.634,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 768.900.067,00	
8.	UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli	Rp. 1.305.931.535,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 671.522.271,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 634.409.264,00	
9.	UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol	Rp. 798.332.897,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 312.630.097,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 485.702.800,00	
10.	UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-una	Rp. 1.165.275.024,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 512.814.224,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 652.460.800,00	
11.	UPT Pendapatan Wilayah X Donggala	Rp. 1.151.635.631,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 726.246.577,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 425.389.054,00	
12.	UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi	Rp. 1.384.001.350,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 952.741.350,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 431.260.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahun anggaran 2023 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 4.548.111.389.946,63 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PAD Rp. 1.719.164.510.752,63
- 2) Pendapatan Transfer Rp. 2.823.279.573.833,00
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 5.667.305.361,00

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 37,80 %. Dengan demikian perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah - Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	30,57	37,80	123,65	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 3.1 perbandingan target dan realisasi kinerja tersebut di atas, capaian realisasi indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan sebesar 37,80 % dari target capaian 30,57 % atau terlampaui dari target yang direncanakan dan hal ini bermakna amat baik.

Dari tabel tersebut diatas nilai capaian 123,65 % bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka nilai capaian kinerja dikategorikan sangat tinggi sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan urusan keuangan di bidang pendapatan sesuai indikator kinerja dalam dokumen Renstra pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2021- 2026, maka dilaksanakan kinerja sesuai alokasi anggaran yang ada. Adapun realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Penerimaan Daerah

No	Ayat Penerimaan	Realisasi		
		T.A 2021	T.A 2022	T.A 2023
1	PAD	1,494,014,931,911.51	1,535,532,842,644.95	1,719,164,510,752.63
2	PENDAPATAN TRANSFER	3,144,403,189,573.00	3,319,202,639,678.00	2,823,279,573,833.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	52,337,669,520.29	40,736,680,037.00	5,667,305,361.00
Jumlah Pendapatan Daerah		4,690,755,791,004.80	4,895,472,162,359.95	4,548,111,389,946.63
Persentase PAD terhadap Pendapatan		31.85	31.37	37.80

Ket : Data Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2023 merupakan Data Realisasi Penerimaan PAD sebelum Audit BPK

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2022 jumlah pendapatan daerah meningkat sebesar Rp.204.716.371.3551,15 (4.36 %) dari tahun 2021. Sedangkan tahun 2023 jumlah pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp.347.360.772.413,32 (-7.10%).

Penurunan Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 dikarenakan menurunnya realisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD merupakan sasaran strategis yang harus dipenuhi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan target dan realisasi PAD dari tahun 2021 sampai tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi PAD

No	Rincian	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Pajak Daerah	934.000.000.000,00	1.074.422.295.409,10	115,03	1.110.000.000.000,00	1.294.028.035.420,28	116,58	1.347.241.242.844,00	1.402.239.230.951,10	104,08
2	Retribusi Daerah	18.092.405.000,00	19.111.110.345,00	105,63	14.857.250.000,00	13.134.648.510,00	88,41	21.420.497.000,00	23.347.868.082,00	109,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	32.380.692.073,00	32.558.872.743,29	100,55	157.141.965.692,00	36.390.219.835,19	23,16	276.180.254.889,00	52.412.250.973,00	18,98
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	263.510.542.725,00	368.153.995.001,12	139,71	279.939.819.818,00	191.979.938.879,48	68,58	310.379.043.150,00	241.165.160.746,53	77,70
	JUMLAH	1.247.983.639.798,00	1.494.246.273.498,51	119,73	1.561.939.035.510,00	1.535.532.842.644,95	98,31	1.955.221.037.883,00	1.719.164.510.752,63	87,93

Ket : Data Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2023 merupakan Data Realisasi Penerimaan PAD sebelum Audit BPK

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Penerimaan PAD meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Untuk tahun 2023 efektivitasnya tidak mencapai 100% yakni sebesar 87,93 %. pengukuran Efektivitas dilakukan dengan membandingkan jumlah realisasi dengan jumlah target Pajak Daerah Provinsi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 komponen PAD yang mempunyai efektivitas paling tinggi yakni Retribusi Daerah dengan capaian persentase efektivitas sebesar 109,00 %. Sedangkan komponen PAD yang efektivitasnya paling rendah adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan capaian sebesar 18,98 %. Pajak daerah merupakan penerimaan yang ditangani langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari PKB, BBNKB, PBPKB, PAP dan Pajak Rokok.

Untuk mengukur perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah - Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	28.34	31.82	112.27	30.47	31.37	102,95	30.57	37.80	123,65

Capaian Kinerja pada tahun 2023 mencapai 123,65 % yang artinya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 102,95 % dan tahun 2021 sebesar 112,27 %. Semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah semakin meningkat.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan anggaran Tahun 2022 oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun periode 2021-2026. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target
Jangka Menengah Di Renstra

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023 (%)	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah -Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	37,80	32,78	115,31

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam Struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 Target Pendapatan sebesar Rp 4.872.033.718.531,00 dan terealisasi Pendapatan Daerah (anggaran setelah perubahan) sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp 4.8548.108.997.338,63 atau 93,35% dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.719.162.118.144,63 atau 87,93% dari Target sebesar Rp. 1.955.221.037.883 dengan rincian :
- Pajak Daerah Target Rp. 1.347.241.242.844 terealisasi sebesar Rp. 1.402.239.230.951,10 atau 104,08%;

- Retribusi Daerah Target Rp. 21.420.497.000 terealisasi sebesar Rp. 23.347.868.082,00 atau 109,00%;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Target Rp. 276.180.254.889 terealisasi sebesar Rp. 52.412.250.973,00 atau 18,98% dan
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Target Rp. 310.379.043.150,00 terealisasi sebesar Rp. 241.162.768.138,53 atau 77,70%.
- b) Pendapatan transfer Target Sebesar Rp. 2.912.838.389.148 terealisasi sebesar Rp. 2.823.279.573.833 atau 96,93% dengan rincian :
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Target Rp. 540.722.718.000 terealisasi sebesar Rp. 473.808.061.173 atau 87,62%;
 - Dana Alokasi Umum Target Rp. 1.547.264.182.000 terealisasi sebesar Rp. 1.561.232.130.595 atau 100,90%;dan
 - Dana Alokasi Khusus Target Rp. 410.561.824.000 terealisasi sebesar Rp. 382.481.075.916 atau 93,16%.
- c) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Target Rp. 3.974.291.500 terealisasi sebesar Rp. 5.667.305.361 atau 142,60% yang bersumber dari Pendapatan Hibah.

Berdasarkan data di atas realisasi Pajak Daerah melampaui target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih banyak ditemui permasalahan/hambatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah yang meliputi:

1. Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Masih rendahnya bentuk sanksi administrasi terhadap keterlambatan dalam membayar pajak sehingga tidak memberi efek jera pada wajib pajak.
3. Dalam proses pemungutan pajak daerah, khususnya pada PKB dan BBN-KB masih sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dikarenakan dibutuhkan koordinasi antara instansi terkait yang tergabung dalam Kantor Bersama Samsat.
4. Kebijakan pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkadang tidak konsisten.

Adapun solusi yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - Mengoptimalkan pelayanan Samsat Unggulan dalam hal ini pengoperasian unit Samsat Keliling (SAMKEL), *Drive Thru*, dan Gerai Samsat Corner.
 - Tersedianya layanan E-SAMSAT dan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.
 - Melaksanakan kegiatan pemasangan sticker ATT (Aksi Tempel-tempel) pada kendaraan bermotor.
 - Seringnya dilakukan kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia bersama antara pihak kepolisian dan UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan.
2. Pemberlakuan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.
3. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam samsat yaitu dari Bapenda, Polisi dan Jasa Raharja agar lebih memudahkan dalam penyelesaian proses administrasi sehingga pelayanan dapat lebih mudah dan lancar.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2023 sumber penganggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut: APBD : Pagu Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 106.045.851.070,00- (Seratus Enam Milyar Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah), realisasinya Rp. 103.012.130.230,85- (Seratus Tiga Milyar Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau 97.14%. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%) (5-8)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah -Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	30,57	37,8	123,65	106.045.851.070,00	103.012.130.230,85	97,14	26,51

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH					90.352.533.821,00		87.626.865.066,85		96,98
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					86.349.842.606,00		83.665.941.814,85		96,89
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3.931.605.791,00	3	3.737.631.952,00	100	95,07
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	926.122.456,00	3	907.588.452,00	100	98,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.005.483.335,00	1	2.830.043.500,00	100	94,16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	58.418.119.684,00	12	56.799.863.744,00	100	97,23
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	270	58.418.119.684,00	270	56.799.863.744,00	100	97,23
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	676.348.385,00	1	673.359.892,00	100	99,56
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	174.981.050,00	2	174.327.410,00	100	99,63
	- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Analisa dan terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	2	199.452.728,00	2	199.317.302,00	100	99,93
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	314.575,00	1	-	100	-
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	301.600.032,00	4	299.715.180,00	100	99,38
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SKM	Laporan	1	1.946.887.162,00	1	1.880.724.146,00	100	95,54
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	979.377.300,00	1	934.442.400,00	100	95,41
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	295.855.713,00	3	283.572.074,00	100	95,85
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	50	671.654.149,00	50	662.709.672,00	100	98,67
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen/Laporan	18	3.309.758.123,00	18	3.282.393.649,91	100	99,17
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	276.509.600,00	6	274.694.648,00	100	99,34
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2.069.105.700,00	3	2.049.163.598,91	100	99,04
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	964.142.823,00	4	958.535.403,00	100	99,42
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	12.615.849.977,00	12	12.312.114.681,94	100	97,59
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	627.730.607,00	9	539.420.000,00	100	85,93
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	11.988.119.370,00	12	11.772.694.681,94	100	98,20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	3.786.422.084,00	1	3.338.346.299,00	100	88,17
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	3.786.422.084,00	1	3.338.346.299,00	100	88,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.664.851.400,00	1	1.641.507.450,00	100	98,60
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Paket	2	49.501.400,00	2	30.658.500,00	100	61,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	3.786.422.084,00	1	3.338.346.299,00	100	88,17
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Laporan	1	3.786.422.084,00	1	3.338.346.299,00	100	88,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.664.851.400,00	1	1.641.507.450,00	100	98,60
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Paket	2	49.501.400,00	2	30.658.500,00	100	61,93
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	4	793.200.000,00	4	788.711.050,00	100	99,43
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Paket	8	822.150.000,00	8	822.137.900,00	100	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					4.002.691.215,00		3.959.439.912,00		98,92
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	4.002.691.215,00	1	3.959.439.912,00	100	98,92
	- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	9	677.196.850,00	9	673.532.928,00	100	99,46
	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	1	411.769.000,00	1	405.111.052,00	100	98,38
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	885.890.350,00	12	861.010.240,00		97,19
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	16	673.831.350,00	16	670.840.750,00	100	99,56
	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	16	387.992.800,00	16	387.404.404,00	100	99,85
	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan - Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen Laporan	1 1	435.284.675,00	1 1	435.014.361,00	100	99,94
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	530.726.190,00	1	526.526.177,00	100	99,21
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu					3.383.951.227,00		3.364.741.611,00		99,43
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2.226.835.677,00		2.216.602.599,00		99,54
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	1.232.304.750,00	1	1.225.692.529,00	100	99,46
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1.232.304.750,00	3	1.225.692.529,00	100	99,46
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	750.831.627,00	5	747.510.770,00	100	99,56
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	750.831.627,00	1	747.510.770,00	100	99,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	243.699.300,00	1	243.399.300,00	100	99,88
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	3	243.699.300,00	3	243.399.300,00	100	99,88
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.157.115.550,00		1.148.139.012,00		99,22
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan	Dokumen	1	1.157.115.550,00	1	1.148.139.012,00	100	99,22
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	1.157.115.550,00	1	1.148.139.012,00	100	99,22
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong					1.577.211.162,00		1.547.398.184,00		98,11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.027.326.695,00		997.528.684,00		97,10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	134.125.261,00	1	107.344.584,00	100	80,03
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	134.125.261,00	3	107.344.584,00	100	80,03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	761.931.934,00	5	761.931.700,00	100	100,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	761.931.934,00	1	761.931.700,00	100	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	131.269.500,00	1	128.252.400,00	100	97,70
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	5	131.269.500,00	5	128.252.400,00	100	97,70
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					549.884.467,00		549.869.500,00		100,00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	549.884.467,00	1	549.869.500,00	100	100,00
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	549.884.467,00	1	549.869.500,00	100	100,00
4	UPT Pendapatan Wilayah III Poso					1.245.639.651,00		1.242.535.681,00		99,75
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					629.018.434,00		625.986.681,00		99,52
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	196.603.334,00	1	196.357.931,00	100	99,88
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	196.603.334,00	5	196.357.931,00	100	99,88
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	359.200.000,00	5	357.078.000,00	100	99,41
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	359.200.000,00	1	357.078.000,00	100	99,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	73.215.100,00	1	72.550.750,00	100	99,09
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	6	73.215.100,00	6	72.550.750,00	100	99,09
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pengelolaan Pendapatan Daerah					616.621.217,00		616.549.000,00		99,99
		Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	616.621.217,00	1	616.549.000,00	100	99,99
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	616.621.217,00	1	616.549.000,00	100	99,99
5	UPT Pendapatan Wil. IV Morowali PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.013.951.768,00		924.237.051,00		91,15
						461.465.918,00		372.987.051,00		80,83
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	60.202.967,00	1	54.311.700,00	100	90,21
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	60.202.967,00	3	54.311.700,00	100	90,21
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	324.818.331,00	1	277.014.551,00	100	85,28
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	324.818.331,00	1	277.014.551,00	100	85,28
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	76.444.620,00	1	41.660.800,00	100	54,50
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	6	76.444.620,00	6	41.660.800,00	100	54,50
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pengelolaan Pendapatan Daerah					552.485.850,00		551.250.000,00		99,78
		Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	552.485.850,00	1	551.250.000,00	100	99,78
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	552.485.850,00	1	551.250.000,00	100	99,78
6	UPT Pendapatan Wil. V Banggai PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.482.573.303,00		1.447.200.638,00		97,61
						869.794.338,00		834.423.238,00		95,93
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	175.817.307,00	1	153.220.438,00	100	87,15
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	175.817.307,00	2	153.220.438,00	100	87,15
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	613.638.681,00	1	602.185.000,00	100	98,13
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	613.638.681,00	1	602.185.000,00	100	98,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	80.338.350,00	1	79.017.800,00	100	98,36
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	1	80.338.350,00	1	79.017.800,00	100	98,36
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					612.778.965,00		612.777.400,00		100,00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	612.778.965,00	1	612.777.400,00	100	100,00
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	612.778.965,00	1	612.777.400,00	100	100,00
7	UPT Pendapatan Wil. VI Bangkep					1.184.813.701,00		1.170.598.250,00		98,80
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					415.913.634,00		401.748.250,00		96,59
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	48.417.764,00	1	42.506.516,00	100	87,79
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	48.417.764,00	3	42.506.516,00	100	87,79
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	299.685.870,00	1	294.096.784,00	100	98,14
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	299.685.870,00	1	294.096.784,00	100	98,14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	67.810.000,00	1	65.144.950,00	100	96,07
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	1	67.810.000,00	1	65.144.950,00	100	96,07
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					768.900.067,00		768.850.000,00		99,99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	768.900.067,00	1	768.850.000,00	100	99,99
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	768.900.067,00	1	768.850.000,00	100	99,99
8	UPT Pendapatan Wil. VII Toli-Toli					130.593.153.500,00		129.846.664.700,00		99,43
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					67.152.227.100,00		66.435.338.300,00		98,93
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	190.398.020,00	1	189.743.633,00	100	99,66
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	190.398.020,00	3	189.743.633,00	100	99,66
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	303.694.251,00	1	303.694.200,00	100	100,00
	- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	303.694.251,00	1	303.694.200,00	100	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	177.430.000,00	1	170.915.550,00	100	96,33
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	3	177.430.000,00	3	170.915.550,00	100	96,33
	PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	634.409.264,00	1	634.113.264,00	100	99,95
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	634.409.264,00	1	634.113.264,00	100	99,95
9	UPT Pendapatan Wil. VIII Buol					798.332.897,00		746.484.205,00		93,51
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					312.630.097,00		262.040.955,00		83,82
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	186.933.724,00	1	144.406.600,00	100	77,25
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	186.933.724,00	3	144.406.600,00	100	77,25
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	87.927.873,00	1	79.865.855,00	100	90,83
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	87.927.873,00	5	79.865.855,00	100	90,83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen	1	37.768.500,00	1	37.768.500,00	100	100,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	5	37.768.500,00	5	37.768.500,00	100	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					485.702.800,00		484.443.250,00		99,74
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	485.702.800,00	1	484.443.250,00	100	99,74
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	485.702.800,00	1	484.443.250,00	100	99,74
10	UPT Pendapatan Wil. IX Tojo Una-Una					1.165.275.024,00		1.159.615.382,00		99,51
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					512.814.224,00		507.850.382,00		99,03
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	127.949.224,00	1	125.384.282,00	100	98,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	127.949.224,00	3	125.384.282,00	100	98,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	264.000.000,00	1	264.000.000,00	100	100,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	264.000.000,00	1	264.000.000,00	100	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	120.865.000,00	1	118.466.100,00	100	98,02
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	3	120.865.000,00	3	118.466.100,00	100	98,02
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					652.460.800,00		651.765.000,00		99,89
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	652.460.800,00	1	651.765.000,00	100	99,89
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	1	652.460.800,00	1	651.765.000,00	100	99,89
11	UPT Pendapatan Wil. X Donggala					1.151.635.631,00		1.146.834.825,00		99,58
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					726.246.577,00		721.549.975,00		99,35
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	448.522.650,00	1	448.522.500,00	100	100,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	448.522.650,00	5	448.522.500,00	100	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	155.473.927,00	5	151.838.625,00	100	97,66
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	155.473.927,00	1	151.838.625,00	100	97,66
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	122.250.000,00	1	121.188.700,00	100	99,13
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	4	122.250.000,00	4	121.188.700,00	100	99,13
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					425.389.054,00		425.285.000,00		99,98
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	425.389.054,00	1	425.285.000,00	100	99,98
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	425.389.054,00	1	425.285.000,00	100	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	UPT Pendapatan Wil. XI Sigi					1.384.001.350,00		1.338.645.066,00		96,72
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN					952.741.350,00		907.385.066,00		95,24
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	215.979.600,00	1	199.414.686,00	100	92,33
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	215.979.600,00	4	199.414.686,00	100	92,33
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	674.031.750,00	5	653.123.780,00	100	96,90
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	674.031.750,00	1	653.123.780,00	100	96,90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	62.730.000,00	1	54.846.600,00	100	87,43
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	4	62.730.000,00	4	54.846.600,00	100	87,43
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN					431.260.000,00	1	431.260.000,00		100,00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	431.260.000,00	1	431.260.000,00	100	100,00
	- Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	1	431.260.000,00	1	431.260.000,00	100	100,00

3.2 REALISASI ANGGARAN

Rincian Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 menurut Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023 Sumber Dana APBD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	90.352.533.821,00	87.626.865.066,85	96,98
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	86.349.842.606,00	83.665.941.814,85	96,89
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.931.605.791,00	3.737.631.952,00	95,07
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	926.122.456,00	907.588.452,00	98,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.005.483.335,00	2.830.043.500,00	94,16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.418.119.684,00	56.799.863.744,00	97,23
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.418.119.684,00	56.799.863.744,00	97,23
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	676.348.385,00	673.359.892,00	99,56
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	174.981.050,00	174.327.410,00	99,63
	- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	199.452.728,00	199.317.302,00	99,93
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	314.575,00	-	-
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	301.600.032,00	299.715.180,00	99,38
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.946.887.162,00	1.880.724.146,00	95,54
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	979.377.300,00	934.442.400,00	95,41
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	295.855.713,00	283.572.074,00	95,85
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	671.654.149,00	662.709.672,00	98,67
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.309.758.123,00	3.282.393.649,91	99,17
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276.509.600,00	274.694.648,00	99,34
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.069.105.700,00	2.049.163.598,91	99,04
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	964.142.823,00	958.535.403,00	99,42
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.615.849.977,00	12.312.114.681,94	97,59
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	627.730.607,00	539.420.000,00	85,93
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.988.119.370,00	11.772.694.681,94	98,20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.786.422.084,00	3.338.346.299,00	88,17
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.786.422.084,00	3.338.346.299,00	88,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.664.851.400,00	1.641.507.450,00	98,60
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.501.400,00	30.658.500,00	61,93

1	2	3	4	5
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	793.200.000,00	788.711.050,00	99,43
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	822.150.000,00	822.137.900,00	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.002.691.215,00	3.959.439.912,00	98,92
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.002.691.215,00	3.959.439.912,00	98,92
	- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	677.196.850,00	673.532.928,00	99,46
	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	411.769.000,00	405.111.052,00	98,38
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	885.890.350,00	861.010.240,00	97,19
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	673.831.350,00	670.840.750,00	99,56
	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	387.992.800,00	387.404.404,00	99,85
	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	435.284.675,00	435.014.361,00	99,94
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	530.726.190,00	526.526.177,00	99,21
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu	3.383.951.227,00	3.364.741.611,00	99,43
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.226.835.677,00	2.216.602.599,00	99,54
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.232.304.750,00	1.225.692.529,00	99,46
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.232.304.750,00	1.225.692.529,00	99,46
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.831.627,00	747.510.770,00	99,56
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.831.627,00	747.510.770,00	99,56
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.699.300,00	243.399.300,00	99,88
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.699.300,00	243.399.300,00	99,88
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.157.115.550,00	1.148.139.012,00	99,22
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.157.115.550,00	1.148.139.012,00	99,22
	- Penagihan Pajak Daerah	1.157.115.550,00	1.148.139.012,00	99,22
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong	1.577.211.162,00	1.547.398.184,00	98,11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.027.326.695,00	997.528.684,00	97,10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.125.261,00	107.344.584,00	80,03
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.125.261,00	107.344.584,00	80,03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.931.934,00	761.931.700,00	100,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	761.931.934,00	761.931.700,00	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.269.500,00	128.252.400,00	97,70
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.269.500,00	128.252.400,00	97,70
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	549.884.467,00	549.869.500,00	100,00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	549.884.467,00	549.869.500,00	100,00
	- Penagihan Pajak Daerah	549.884.467,00	549.869.500,00	100,00
4	UPT Pendapatan Wilayah III Poso	1.245.639.651,00	1.242.535.681,00	99,75
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	629.018.434,00	625.986.681,00	99,52
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.603.334,00	196.357.931,00	99,88

1	2	3	4	5
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.603.334,00	196.357.931,00	99,88
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.200.000,00	357.078.000,00	99,41
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.200.000,00	357.078.000,00	99,41
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.215.100,00	72.550.750,00	99,09
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.215.100,00	72.550.750,00	99,09
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	616.621.217,00	616.549.000,00	99,99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	616.621.217,00	616.549.000,00	99,99
	- Penagihan Pajak Daerah	616.621.217,00	616.549.000,00	99,99
5	UPT Pendapatan Wil. IV Morowali	1.013.951.768,00	924.237.051,00	91,15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.465.918,00	372.987.051,00	80,83
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.202.967,00	54.311.700,00	90,21
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.818.331,00	277.014.551,00	85,28
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	324.818.331,00	277.014.551,00	85,28
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.444.620,00	41.660.800,00	54,50
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.444.620,00	41.660.800,00	54,50
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	552.485.850,00	551.250.000,00	99,78
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	552.485.850,00	551.250.000,00	99,78
	- Penagihan Pajak Daerah	552.485.850,00	551.250.000,00	99,78
6	UPT Pendapatan Wil. V Banggai	1.482.573.303,00	1.447.200.638,00	97,61
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah	869.794.338,00	834.423.238,00	95,93
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.817.307,00	153.220.438,00	87,15
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.638.681,00	602.185.000,00	98,13
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	613.638.681,00	602.185.000,00	98,13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.338.350,00	79.017.800,00	98,36
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.338.350,00	79.017.800,00	98,36
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	612.778.965,00	612.777.400,00	100,00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	612.778.965,00	612.777.400,00	100,00
	- Penagihan Pajak Daerah	612.778.965,00	612.777.400,00	100,00
7	UPT Pendapatan Wil. VI Bangkep	1.184.813.701,00	1.170.598.250,00	98,80
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.913.634,00	401.748.250,00	96,59
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.417.764,00	42.506.516,00	87,79
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.685.870,00	294.096.784,00	98,14
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.685.870,00	294.096.784,00	98,14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.810.000,00	65.144.950,00	96,07
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.810.000,00	65.144.950,00	96,07
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	768.900.067,00	768.850.000,00	99,99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	768.900.067,00	768.850.000,00	99,99
	- Penagihan Pajak Daerah	768.900.067,00	768.850.000,00	99,99

1	2	3	4	5
8	UPT Pendapatan Wil. VII Toli-Toli	1,305,931,535.00	1,298,466,647.00	99.43
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	671,522,271.00	664,353,383.00	98.93
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190,398,020.00	189,743,633.00	99.66
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190,398,020.00	189,743,633.00	99.66
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303,694,251.00	303,694,200.00	100.00
	- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303,694,251.00	303,694,200.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,430,000.00	170,915,550.00	96.33
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177,430,000.00	170,915,550.00	96.33
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	634,409,264.00	634,113,264.00	99.95
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	634,409,264.00	634,113,264.00	99.95
- Penagihan Pajak Daerah	634,409,264.00	634,113,264.00	99.95	
9	UPT Pendapatan Wil. VIII Buol	798,332,897.00	746,484,205.00	93.51
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	312,630,097.00	262,040,955.00	83.82
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186,933,724.00	144,406,600.00	77.25
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186,933,724.00	144,406,600.00	77.25
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,927,873.00	79,865,855.00	90.83
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87,927,873.00	79,865,855.00	90.83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,768,500.00	37,768,500.00	100.00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,768,500.00	37,768,500.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	485,702,800.00	484,443,250.00	99.74
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	485,702,800.00	484,443,250.00	99.74
- Penagihan Pajak Daerah	485,702,800.00	484,443,250.00	99.74	
10	UPT Pendapatan Wil. IX Tojo Una-Una	1,165,275,024.00	1,159,615,382.00	99.51
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	512,814,224.00	507,850,382.00	99.03
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127,949,224.00	125,384,282.00	98.00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127,949,224.00	125,384,282.00	98.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264,000,000.00	264,000,000.00	100.00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264,000,000.00	264,000,000.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,865,000.00	118,466,100.00	98.02
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120,865,000.00	118,466,100.00	98.02
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	652,460,800.00	651,765,000.00	99.89
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	652,460,800.00	651,765,000.00	99.89
- Penagihan Pajak Daerah	652,460,800.00	651,765,000.00	99.89	
11	UPT Pendapatan Wil. X Donggala	1,151,635,631.00	1,146,834,825.00	99.58
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	726,246,577.00	721,549,975.00	99.35
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448,522,650.00	448,522,500.00	100.00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	448,522,650.00	448,522,500.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155,473,927.00	151,838,625.00	97.66
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155,473,927.00	151,838,625.00	97.66	

1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122,250,000.00	121,188,700.00	99.13
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122,250,000.00	121,188,700.00	99.13
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	425,389,054.00	425,285,000.00	99.98
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	425,389,054.00	425,285,000.00	99.98
	- Penagihan Pajak Daerah	425,389,054.00	425,285,000.00	99.98
12	UPT Pendapatan Wil. XI Sigi	1,384,001,350.00	1,338,645,066.00	96.72
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	952,741,350.00	907,385,066.00	95.24
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215,979,600.00	199,414,686.00	92.33
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215,979,600.00	199,414,686.00	92.33
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	674,031,750.00	653,123,780.00	96.90
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	674,031,750.00	653,123,780.00	96.90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,730,000.00	54,846,600.00	87.43
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62,730,000.00	54,846,600.00	87.43
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	431,260,000.00	431,260,000.00	100.00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	431,260,000.00	431,260,000.00	100.00
	- Penagihan Pajak Daerah	431,260,000.00	431,260,000.00	100.00

3.3 INOVASI

Inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan PAD khususnya Peningkatan Pajak Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan SAMSAT Drive Thru

Pelayanan SAMSAT Drive Thru merupakan upaya dalam meningkatkan layanan kesamsatan serta memudahkan masyarakat melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) yang tempat pelaksanaannya memungkinkan pemilik kendaraan/wajib pajak melakukan transaksi tanpa perlu turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

Mekanisme :

1) Pendaftaran

Wajib Pajak melaksanakan pendaftaran diloket Roda 2 maupun Roda. Pendaftaran diterima oleh petugas kepolisian untuk diteliti persyaratan sesuai dengan aturan petugas pendaftaran melaksanakan input data dan memvalidasi STNK.

2) Penetapan

Setelah menerima berkas dari pendaftaran kemudian ditetapkan pajak dari Jasa Raharja. Bagian penetapan memeriksa kebenaran pajak dan jasa raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian penetapan menyerahkan berkas kepada bagian pembayaran.

3) Pembayaran

Setelah menerima ketetapan pajak dan jasa raharja dari bagian penetapan, petugas pembayaran melaksanakan pemanggilan kepada wajib pajak untuk melaksanakan penagihan sesuai dengan SKPD. Setelah menerima pembayaran kemudian SKPD divaidasi sebagai tanda bukti bahwa pajak kendaraan tersebut telah diterima.

2.Sistem Pembayaran Non Tunai QRIS dan EDC

Sistem Pembayaran Non Tunai QRIS dan EDC pada Samsat Induk Kota Palu merupakan bentuk komitmen Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan layanan kesamsatan pada Samsat Induk Kota Palu sehingga memberikan kemudahan memilih opsi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi masyarakat Kota Palu.

3. Aplikasi SIGNAL – Samsat Digital Nasional

Dalam melakukan pengesahan STNK tahunan, Pembayaran Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDLLJ) di setiap tahunnya, kini semakin aman dan mudah dengan aplikasi SIGNAL. Aplikasi SIGNAL sudah tersedia di google play store atau app store.

4. Pemanfaatan Data Kependudukan

Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kerjasama ini bertujuan agar dapat memkasimalkan pendapatan daerah melalui data kependudukan yang lebih valid atas kepemilikan objek pajak.

5. ATT (Aksi Tempe-tempel)

Merupakan bentuk aksi pemberitahuan dan teguran kepada Wajib Pajak yang telah menunggak pajak kendaraannya dengan menempel stiker pada kendaraan bermotor Wajib Pajak. Dengan adanya aksi pemberitahuan dan teguran tersebut, diharapkan agar Wajib Pajak segera melunasi pajak kendaraannya.

6. SambarMo (Samsat Bermotor Online)

Yaitu salah satu terobosan inovatif yang berawal dari diperlukannya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). SambarMo sebuah layanan Samsat yang dapat menjangkau daerah atau wilayah – wilayah pelosok yang akses wilayahnya tidak terjangkau oleh Samsat Induk, Pos Pelayanan dan Samsat Keliling.

3.4 PENGHARGAAN

PREDIKAT “BB” (SANGAT BAIK) DALAM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja selama Tahun 2023. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disetiap tahunnya dalam melakukan penyelenggaraan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah dan secara operasional melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di samping itu mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Penyerapan dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan organisasi, pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan yang dilakukan baik di Badan maupun di UPT pengelolah pendapatan.

Secara umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat di kategorikan **Baik**. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

B. HAMBATAN

Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Sasaran Program masih terdapat antara lain :

1. Kurang nyamannya ruangan pelayanan pembayaran pajak pada beberapa UPTB Pendapatan;
2. Sistem Online yang digunakan pada beberapa Kantor SAMSAT sering mengalami masalah;
3. Kurang optimalnya mobil yang digunakan untuk pelayanan Samsat Keliling (SAMKEL); dan
4. Kurangnya dana operasional untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia dan Samsat Keliling (SAMKEL).

C. TINDAK LANJUT

1. Perlunya perbaikan/penataan kembali ruangan pada beberapa UPTB Pendapatan;
2. Perlunya perbaikan sistem online yang digunakan pada beberapa Kantor SAMSAT;
3. Perlunya penambahan dana operasional untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia dan Samsat Keliling (SAMKEL).

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. RIEKLANATA MUSTAQIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670727 198603 1 005

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**

Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	40,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPENDA	79

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	92,649,612,972.00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	10,763,201,446.00	APBD

Palu, 13 Februari 2024

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM., M.Si

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. NUR, S.STP., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Pihak Pertama,
Sekretaris

MUH. NUR, S.STP., M.Si.
NIP. 19810303 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64
1,1	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84
-	Tersusunnya penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
-	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen
1,2	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	1 Laporan
-	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 87.123.151.447	APBD
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.750.389.765	APBD
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 528.441.265	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.221.948.500	
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 63.680.249.268	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 63.680.249.268	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 87.123.151.447	APBD

Palu, 13 Februari 2024

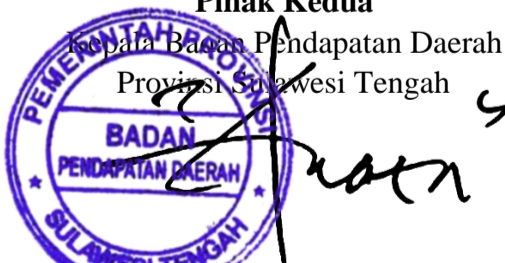
Pihak Pertama
Sekretaris



ABDUN ASER DAEPATOLA, S.Sos
NIP. 19660216 199903 1 003

Pihak Kedua

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. KIKI LANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINA SETIAWATI, S.STP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUH. NUR, S.STP., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Kepegawaian &
Umum

MUH. NUR, S.STP., M.Si.
NIP. 19810303 200012 1 001

RINA SETIAWATI, S.STP
NIP. 19850420 200312 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	100%
-	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
-	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang
-	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang
2.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH	18 Dokumen/Laporan
-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
-	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
-	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
3.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	9 Laporan
-	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit
4.	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	1 Laporan
-	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Laporan
-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit
-	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit
-	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.338.633.050	APBD
- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 958.538.800	
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 326.308.000	
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 53.786.250	
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.689.439.332	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	279.886.509	
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	342.680.000	
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 801.872.873	
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 7.062.681.650	APBD
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 7.062.681.650	
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.037.986.771	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.037.986.771	
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.622.224.881	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.564.881	
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	617.220.000	
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	940.440.000	
TOTAL ANGGARAN Rp.	87.123.151.447	

Pihak Kedua
Sekretaris

MUH. NUR, S.STP., M.Si.
NIP. 19810303 200012 1 001

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

RINA SETIAWATI, S.STP
NIP. 19850420 200312 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZAITUN N.K. ZAENONG, SE., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah

ZAITUN N.K. ZAENONG, SE., MM

NIP. 19720718 200212 2 004

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi	100%
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan sistem informasi terhadap unit kerja	Persentase unit kerja yang terlayani sistem informasi sesuai standar	100%
-	Terpantaunya Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan	Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpelihara	100%

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 83.181.546.782	APBD
1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.689.439.332	APBD
- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 264.999.950	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 83.181.546.782	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. R. K. LANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah



ZAITUN N.K. ZAENONG, SE., MM
NIP. 19720718 200212 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SOFYAN, SH**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZAITUN N.K. ZAENONG, SE., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah

ZAITUN N.K. ZAENONG, SE., MM

NIP. 19720718 200212 2 004

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bidang Infrastruktur

SOFIAN, SH

NIP. 19720807 200604 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan sistem informasi terhadap unit kerja	Persentase unit kerja yang terlayani sistem informasi sesuai standar	100%
-	Terpeliharanya Infrastruktur Jaringan Sistem pendapatan	Jumlah Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan Yang Terpelihara	100%

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KET

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	3.941.604.665
Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp.	200.000.050
TOTAL ANGGARAN Rp.		3.941.604.665,00

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Kepala Sub Bidang Infrastruktur



ZAITUN NK. ZAENONG, SE., MM
NIP. 19720718 200212 2 004



SOFYAN, SH
NIP. 19720807 200604 1 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVA ISMALA DEWI, SE., MM.**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelaporan Data Dan Informasi Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZAITUN NK. ZAENONG, SE., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah

ZAITUN NK. ZAENONG, SE., MM
NIP. 19720718 200212 2 004

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bidang Pelaporan Data Dan
Informasi

NOVA ISMALA DEWI, SE., MM
NIP. 19770527 200801 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

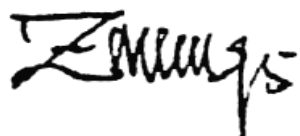
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data pajak dan retribusi	Persentase data pajak dan retribusi yang akurat	100%
	- Terbangunnya Aplikasi Sistem Pendapatan	Jumlah Aplikasi Sistem Pendapatan	100%
	- Tersusunnya Data Base Pajak dan Retribusi	Jumlah Dokumen Data Base Pajak dan Retribusi yang disusun	100%
	- Terekapitulasinya Transaksi Pajak dan Retribusi	Jumlah Dokumen Rekapitulasi transaksi Pajak dan Retribusi	100%

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp.	3.941.604.665	APBD
- Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Rp. Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	526.523.250	
TOTAL ANGGARAN Rp.	3.941.604.665	

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengolahan Sistem
Informasi Pendapatan Daerah

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pelaporan Data Dan Informasi



ZAITUN NK. ZAENONG, SE., MM
NIP. 19720718 200212 2 004



NOVA ISMALA DEWI, SE., MM
NIP. 19770527 200801 2 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUSTAQIM KARIM, SH., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

MUSTAQIM KARIM, SH., MM
NIP. 19711115 200701 1 020

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pendapatan Transfer & Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pendapatan Transfer & Lain-lain Pendapatan yang Sah	100%
2	Meningkatnya PAD	Persentase Peningkatan PAD	100%
2.1	Optimalnya Realisasi PAD	Laju Pertumbuhan PAD	100%
	Tersusunnya Rekomendasi atas Wajib Pajak - yang mengajukan Keberatan dan/atau Keringanan Pajak & retribusi Daerah	Persentase Permohonan Keberatan dan/atau Keringanan Pajak & Retribusi Daerah yang Terlayani	1 Dokumen
	Tersusunnya Rumusan Bahan atas Kebijakan - Teknis Pengaturan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Rumusan Bahan atas Kebijakan Pendapatan	1 Dokumen
	Kelebihan Pembayaran Pajak di Kembalikan - Kepada Wajib Pajak Daerah	Persentase Permohonan Pengambilan Pembayaran Pajak Daerah yang Terlayani	1 Dokumen
	Tersusunnya Dokumen Perhitungan Dasar - Pengenaan dan Rekapitulasi Penetapan PKB dan BBNKB	Jumlah Dokumen Perhitungan Dasar Pengenaan dan Rekapitulasi Penetapan PKB dan BBNKB	1 Dokumen

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 83.181.546.782	
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.941.604.665	APBD
2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.941.604.665	APBD
- Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp. 37.882.000	
TOTAL ANGGARAN Rp.	87.123.151.447	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



D. SRIEKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

MUSTAQIM KARIM, SH., MM
NIP. 19711115 200701 1 020

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIAN DHARMAWAN, S.IP., M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUSTAQIM KARIM, SH., MM**
Jabatan : Kepala Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

MUSTAQIM KARIM, SH., MM
NIP. 19711115 200701 1 020

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Pajak Daerah

RIAN DHARMAWAN, S.IP., M.Si
NIP. 19880609 200701 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Optimalnya Realisasi PAD, Pendapatan Transfer & Lain-lain Pendapatan yang Sah	Laju Pertumbuhan PAD, Pendapatan Transfer & Lain-lain Pendapatan yang Sah	100%
	- Tersusunnya Peta Potensi KTMDU yang terpungut dan terverifikasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi KTMDU yang terpungut dan terverifikasi	13 Dokumen
	- tersusunnya peta potensi PBBKB	jumlah dokumen peta potensi PBBKB	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Teknis PAP	Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan PAP	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Realisasi Penerimaan PAP dan Pajak Rokok	Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan PAP dan Pajak Rokok	13 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Potensi PAP dan Lain-Lain PAD yang sah (denda PKB, denda BBNKB dan denda PAP)	Jumlah Dokumen Potensi PAP dan Lain-Lain PAD yang Sah (denda PKB, denda BBNKB dan denda PAP)	13 Dokumen


KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. Rp3.941.604.665	APBD
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	194.714.000	
- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	97.550.000	
- Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	194.562.800	
TOTAL ANGGARAN Rp.	3.941.604.665	

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah



MUSTAQIM KARIM, SH., MM
NIP. 19711115 200701 1 020

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pajak Daerah



RIAN DHARMAWAN, S.IP., M.Si
NIP. 19880609 200701 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUPARDIN KAHAR, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUH. NUR, S.STP., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah

MUSTAQIM KARIM, SH., MM
NIP. 19711115 200701 1 020

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-Lain

SUPARDIN KAHAR, S.Sos
NIP. 19710801 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Optimalnya Pendapatan Transfer & Lain-lain Pendapatan yang Sah	Laju Pertumbuhan Pendapatan Transfer & Lain-lain Pendapatan yang Sah	100%
-	Terinputnya Data Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan Lain-lain yang Sah	2 Dokumen
-	Tersusunnya Dokumen Potensi Retribusi dan Lain-lain PAD yang sah dari Pemanfaatan BMD	Jumlah Dokumen Potensi Retribusi Daerah dan serta DBH Pusat dan Lain-Lain PAD yang Sah dari Pemanfaatan BMD	4 Dokumen

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Pendapatan Daerah	Rp. 999.942.065	APBD
- Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 48.067.350	
- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Rp. 289.665.465	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 999.942.065	

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah



MUSTAQIM KARIM, SH., MM
NIP. 19711115 200701 1 020

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-Lain



SUPARDIN KAHAR, S.Sos
NIP. 19710801 200701 1 016

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL RAHMAN, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah

ABDUL RAHMAN, SH
NIP. 19770722 200212 1 005

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terkendalinya Kinerja Pendapatan dan Belanja Unit Kerja Badan Pendapatan	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pendapatan	100%
1.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Pendapatan	Persentase objek temuan hasil pemeriksaan	75%
	- Tertanganinya Temuan Hasil Pemeriksaan Khusus (PANSUS)	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Khusus (PANSUS) yang tertangani	75%
	- menyusun tindak lanjut hasil pengawasan aparat pemeriksa internal dan eksternal dan memantau pelaksanaannya	persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100%
	- melakukan koordinasi kepada instansi terkait dengan pemeriksaan	jumlah instansi yang dilakukan koordinasi	1 Dokumen
1.2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi	Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	100%
	- monitoring dan pendampingan kegiatan pemungutan, penagihan, penegakan hukum dan kegiatan intensifikasi pajak dan retribusi daerah lainnya	jumlah laporan permasalahan yang ada di lapangan	1 Dokumen

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.941.604.665	APBD
1.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.941.604.665	
Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 385.284.675	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 460.726.190	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 3.941.604.665	

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RUKLANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

ABDUL RAHMAN, SH
NIP. 19770722 200212 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISKANDAR, SE., MM**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ABDUL RAHMAN, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak kedua,
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah

ABDUL RAHMAN, SH
NIP. 19770722 200212 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

ISKANDAR, SE., MM
NIP. 19740303 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Pendapatan	- Persentase UPTB yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan dan Pembinaan	100%
		- Persentase objek temuan hasil pemeriksaan	75%
	- Terawasinya Kinerja Reguler Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja yang diawasi kinerjanya secara Reguler	11 Laporan
	- Terpantaunya Unit Kerja dalam Menindaklanjuti Temuan Eksternal	Jumlah Unit Kerja yang terpantau dalam menindaklanjuti temuan eksternal	11 Laporan
	- Terkompulasinya Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	Jumlah Dokumen kompulasi temuan hasil pemeriksaan eksternal	1 Laporan
	- Tertanganinya Temuan Hasil Pemeriksaan	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang tertangani	1 Laporan

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.941.604.665	
- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 385.284.675	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 3.941.604.665	

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah




ABDUL RAHMAN, SH
NIP. 19770722 200212 1 005

ISKANDAR, SE., MM
NIP. 19740303 201001 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GINA ANGRANI YUNUS, S.Kom., M.Si.**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ABDUL RAHMAN, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak kedua,
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah

ABDUL RAHMAN, SH
NIP. 19770722 200212 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Pengendalian Sistem
Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah

GINA ANGRANI YUNUS, S.Kom., M.Si.
NIP. 19830627 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

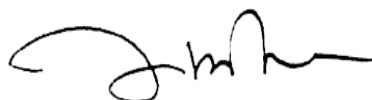
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Pendapatan	Persentase indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di unit kerja	70%
		Persentase Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	100%
	- Terpantau dan tekendalnya sistem administrasi pelayanan pada unit kerja	jumlah telaan staf hasil pengendalian	1 Laporan
	- terpantaunya pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan pada unit kerja	Jumlah Unit Kerja yang terpantau dalam pelayanan sesuai sop	11 Laporan
	- Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kantor Samsat	Jumlah UPT dan Indikator SKM	11 Laporan
	- Terselenggaranya Koordinasi, Evaluasi dan Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Distribusi dan Penggunaan Dokumen Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi dan evaluasi	2 Dokumen
- Terselenggaranya Evaluasi dan Koordinasi Hasil Temuan, Pengawasan, Monitoring dan Pemantauan Pelaksanaan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi dan Koordinasi	1 Dokumen	

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.941.604.665	
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 460.726.190	
TOTAL ANGGARAN Rp.	3.941.604.665	

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah



ABDUL RAHMAN, SH
NIP. 19770722 200212 1 005

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pengendalian Sistem
Administrasi Pelayanan Pendapatan Daerah



GINA ANGRIANI YUNUS, S.Kom., M.Si.
NIP. 19830627 201001 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. JINTAN, MM.**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah

Dra. JINTAN, MM.
NIP. 19660602 198603 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Teknis Pendapatan Daerah	Persentase Badan Pendapatan Daerah Provinsi yang Menerapkan Kebijakan Teknis	100%

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 83.181.546.782	APBD
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.941.604.665	APBD
TOTAL ANGGARAN Rp.	87.123.151.447	

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Kepala badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIZKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah



Dra. JINTAN, MM.
NIP. 19660602 198603 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERLINA TONGKO, SH., M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. JINTAN, MM.**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah

Dra. JINTAN, MM.
NIP. 19660602 198603 2 010

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Penetapan Pendapatan Daerah

HERLINA TONGKO, SH., M.Si
NIP. 19721020 200012 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan	Persentase Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan yang Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan	100%
	- Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Dokumen
2.	Meningkatkan Regulasi Kerjasama Pelayanan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi yang Berkualitas	100%
	- Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah		
1. Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 999.942.065	APBD
- Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 156.812.050	
2. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.941.604.665	APBD
- Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 505.552.500	
TOTAL ANGGARAN Rp.	87.123.151.447,00	

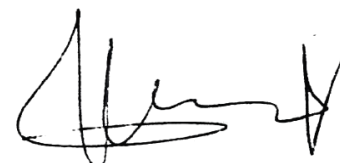
Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah



Dra. JINTAN, MM.
NIP. 19660602 198603 2 010

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan
Pendapatan Daerah



HERLINA TONGKO, SH., M.Si
NIP. 19721020 200012 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHDAYANI, S.STP., M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. JINTAN, MM.**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Pengembangan dan
Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dra. JINTAN, MM.
NIP. 19660602 198603 2 010

WAHDAYANI, S.STP., M.Si
NIP. 19820110 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan	Persentase Inovasi Pengembangan Pelayanan Pendapatan yang Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan	100%
	- Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Dokumen
	- Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen
	- Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	5 Dokumen
2	Meningkatkan Regulasi Kerjasama Pelayanan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi yang Berkualitas	100%
	- Tersedianya Analisa dan terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	32 Dokumen
	- Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen
	- Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1 Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 999.942.065	APBD
- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 156.812.050	
- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp. 250.772.550	
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp. 254.624.650	
2 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.941.604.665	APBD
- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Rp. 427.165.450	
- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 376.331.750	
- Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 505.552.500	
TOTAL ANGGARAN Rp.	87.123.151.447	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah



Dra. JINTAN, MM.
NIP. 19660602 198603 2 010

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah



WAHDAYANI, S.STP., M.Si
NIP. 19820110 200012 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

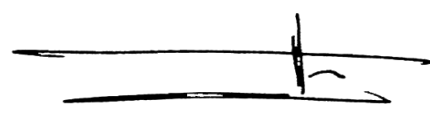
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah I
P a l u



YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada UPTB Wil. I Palu	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. I Palu	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTB Wil. I Palu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. Daerah Provinsi	2.316.886.904	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp.	1.165.464.350	
TOTAL ANGGARAN Rp.	3.482.351.254	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama

Kepala UPT Pendapatan Wilayah I
P a l u



YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

Pihak Kedua

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. IDRIS TENUATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LISMASARI S. MADRIS, S.Kom., MM**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah I

P a l u

YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP

NIP. 19820926 201001 1 010

LISMASARI S. MADRIS, S.Kom., MM

NIP. 19750528 200904 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. I Palu - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. I Palu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Dokumen 3 Paket
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. I Palu - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. I Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan 1 Laporan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. I Palu - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Laporan 3 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.301.296.760	
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.301.296.760	
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 746.000.144	
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 746.000.144	
3. Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 269.590.000	
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 269.590.000	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 2.316.886.904	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Kepala UPT Pendapatan Wilayah I

P a l u



YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP

NIP. 19820926 201001 1 010

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



LISMASARI S. MADRIS, S.Kom., MM

NIP. 19750528 200904 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALTAR, SH., MM**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah I
P a l u

YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos., MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kasie PKB dan BBN-KB

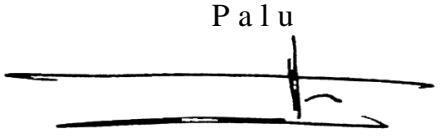
ALTAR, SH., MM
NIP. 19850902 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. I Palu	Persentase WP yang terlayani	100%
	- Tersusunnya Laporan Realisasi pembayaran PKB dan BBNKB di UPTB Wil. I Palu	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB	12 Laporan


KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 1.165.464.350	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 582.732.175	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 1.165.464.350	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah I
P a l u



YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie PKB dan BBN-KB



ALTAR, SH., MM
NIP. 19850902 200604 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHILMI, SE**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUDHIANSYAH LATJINALA. S.Sos, MAP**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kasie Penetapan dan Penagihan

NURHILMI, SE

NIP. 19700827 199103 2 010

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah I

P a l u

YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP

NIP. 19820926 201001 1 010


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. I Palu Tersusunnya data Wajib Pajak yang - menunggak PKB dan PAP di UPTB Wil. I Palu	Persentase WP yang terlayani Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	100% 12 Dokumen

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp.	1.165.464.350	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp.	582.732.175	
TOTAL ANGGARAN Rp.		1.165.464.350	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah I
P a l u



YUDHIANSYAH LATJINALA, S.Sos, MAP
NIP. 19820926 201001 1 010

Pihak Pertama
Kasie Penetapan dan Penagihan



NURHILMI, SE
NIP. 19700827 199103 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **I R W I N, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
Parigi Moutong

I R W I N, SE

NIP. 19750411 200801 1 006

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTB Wil. II Parigi Moutong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada UPTB Wil. II Parigi Moutong	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. II Parigi Moutong	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 997.369.261	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 519.841.901	
TOTAL ANGGARAN Rp.	1.517.211.162	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



[Signature]

Irs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19870727 198603 1 005

Pihak Pertama

Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
Parigi Moutong



IRWIN, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUHAERIL, S.Sos., MAP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IRWIN, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
Parigi Moutong

IRWIN, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

SUHAERIL, S.Sos., MAP
NIP. 19740918 200801 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. II Parigi Moutong - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. II Parigi Moutong	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Dokumen 3 Paket
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada Wil. II Parigi Moutong - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. II Parigi Moutong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan 1 Laporan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. II Parigi Moutong - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Laporan 5 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	760.904.000	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	760.904.000	
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.125.261	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.125.261	
3. Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.340.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.340.000	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 997.369.261	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
Parigi Moutong



IRWIN, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



SUHAERIL, S.Sos., MAP
NIP. 19740918 200801 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A D H A M, S.Sos**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I R W I N, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
Parigi Moutong

I R W I N, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kasie PKB dan BBN-KB

A D H A M, S.Sos.
NIP. 19741019 200801 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. II Parigi Moutong Tersusunnya Laporan Realisasi pembayaran - PKB dan BBNKB di UPTB Wil. II Parigi Moutong	Persentase WP yang terlayani Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB	100% 12 Laporan

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 519.841.901	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 259.920.951	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 519.841.901	APBD

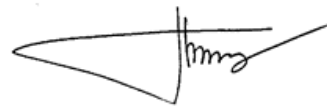
Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
Parigi Moutong



IRWIN, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama
Kasie PKB dan BBN-KB



ADHAM, S.Sos
NIP. 19741019 200801 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAHRUL LABUDU, S.Sos**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IRWIN, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
Parigi Moutong

Pihak Pertama,
Kasie Penetapan dan Penagihan

IRWIN, SE
NIP. 19750411 200801 1 006

SAHRUL LABUDU, S.Sos
NIP. 19700522 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. II Parigi Moutong Tersusunnya data Wajib Pajak yang - menunggak PKB dan PAP di UPTB Wil. II Parigi Moutong	Persentase WP yang terlayani Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	100% 12 Dokumen

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 519.841.901	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 259.920.951	
TOTAL ANGGARAN Rp.	519.841.901	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
Parigi Moutong



IRWIN, SE
NIP. 19740411 200801 1 006

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie Penetapan dan Penagihan



SAHRUL LABUDU, S.Sos
NIP. 19700522 200604 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

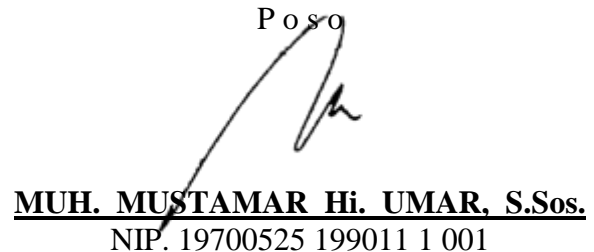
Pihak Pertama,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
P o s o

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005



MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTB Wil. III Poso	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Pendapatan Paa Daerah Pada UPTB Wil. III Poso	Persentase Realisasi Pajak Daerah Pada UPTB Wil. III Poso	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 629.625.973	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 541.013.678	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 1.170.639.651	APBD

Palu, 13 Februari 2024

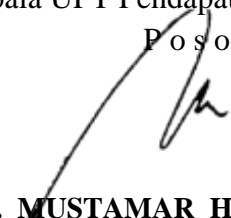
Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



[Signature]

Drs. RIFKAL NATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Pihak Pertama
Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
Poso



MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IHDA LASODI, SE.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
P o s o

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

IHDA LASODI, SE.
NIP. 19750322 200801 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. III Poso - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. III Poso	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Dokumen 5 Paket
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. III Poso - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. III Poso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan 1 Laporan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. III Poso - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Laporan 6 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Rp. Daerah	433.897.473	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433.897.473	
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.548.500	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.548.500	
3. Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Rp. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.180.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.180.000	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 629.625.973	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
P o s o

MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

IHDA LASODI, SE.
NIP. 19750322 200801 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEITYWATI MBORESA, SE.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
P o s o

Pihak Pertama,
Kasie PKB dan BBN-KB

MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

MEITYWATI MBORESA, SE.
NIP. 19680503 200604 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. III Poso	Persentase WP yang terlayani	100%
	- Tersusunnya Laporan Realisasi pembayaran PKB dan BBNKB di UPTB Wil. III Poso	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB	12 Laporan

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 541.013.678	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 270.506.839	
TOTAL ANGGARAN Rp.	541.013.678	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
 Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
 Poso

Pihak Pertama
 Kasie PKB dan BBN-KB

MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
 NIP. 19700525 199011 1 001

MEITYWATI MBORESA, SE.
 NIP. 19680503 200604 2 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAHRUN B. SAPPE, SE.**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah III Poso

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
P o s o

MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kasie Penetapan dan Penagihan

BAHRUN B. SAPPE, SE.
NIP. 19850714 201101 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. III Poso	Persentase WP yang terlayani	100%
	- Tersusunnya Laporan Realisasi pembayaran PKB dan BBNKB di UPTB Wil. III Poso	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB	12 Laporan


KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp.	541.013.678	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp.	270.506.839	
TOTAL ANGGARAN Rp.		541.013.678	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
Poso

Pihak Pertama
Kasie Penetapan dan Penagihan


MUH. MUSTAMAR Hi. UMAR, S.Sos.
NIP. 19700525 199011 1 001


BAHRUN B. SAPPE, SE.
NIP. 19850714 201101 1 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
Morowali

AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.

NIP. 19740824 200012 1 001

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTB Wil. IV Morowali	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada UPTB Wil. IV Morowali	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. IV Morowali	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 587.915.767	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 801.036.000	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 1.388.951.767	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



DR. EFKLANITA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Pihak Pertama

Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
Morowali

WIDJAJA, SE., MM
NIP. 19680510 200701 1 063

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MIKHA PADANG, SH.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

MIKHA PADANG, SH.

NIP. 19880710 201101 2 011

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
Morowali

AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.

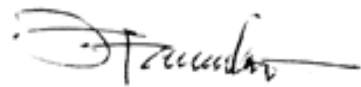
NIP. 19740824 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. IV Morowali - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. IV Morowali	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Dokumen 3 Paket
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. IV Morowali - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. IV Morowali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Dokumen 1 Laporan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. IV Morowali - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Laporan 6 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 312.798.137	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 312.798.137	
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 168.591.200	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 168.591.200	
3. Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 106.526.430	APBD
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 106.526.430	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 587.915.767	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
Morowali



AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
NIP. 19740824 200012 1 001

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



MIKHA PADANG, SH.
NIP. 19880710 201101 2 011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARIS MUCHTAR, SE**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
Morowali

AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
NIP. 19740824 200012 1 001

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kasie PKB dan BBN-KB

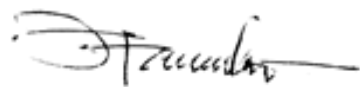
HARIS MUCHTAR, SE
NIP. 19661009 200701 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. IV Morowali	Persentase WP yang terlayani	1 Dokumen
	Tersusunnya Laporan Realisasi pembayaran - PKB dan BBNKB di UPTB Wil. IV Morowali	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB	12 Laporan

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 801.036.000	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 400.518.000	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 801.036.000	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
Morowali



AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
NIP. 19740824 200012 1 001

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama
Kasie PKB dan BBN-KB



HARIS MUCHTAR, SE
NIP. 19661009 200701 1 020

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERI YANTO M. HARIS, SE**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
Morowali

Pihak Pertama,
Kasie Penetapan dan Penagihan

AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
NIP. 19740824 200012 1 001

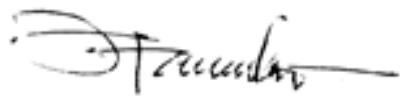
HERI YANTO M. HARIS, SE
NIP. 19820401 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. IV Morowali Tersusunnya data Wajib Pajak yang - menunggak PKB dan PAP di UPTB Wil. IV Morowali	Persentase WP yang terlayani Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	100% 12 Dokumen

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 801.036.000	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 400.518.000	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 801.036.000	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
Morowali



AGUS MAPATOBA, S.Sos., MM.
NIP. 19740824 200012 1 001

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie Penetapan dan Penagihan



HERI YANTO M. HARIS, SE
NIP. 19820401 201001 1 013

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah V
Banggai

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE
NIP. 19700606 200701 1 030

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada UPTB Wil. V Banggai	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. V Banggai	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. Daerah Provinsi	858.080.341	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp.	520.442.962	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 1.378.523.303	APBD

Palu, 13 Februari 2024


Pihak Kedua

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


Irs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670227 198603 1 005

Pihak Pertama

Kepala UPT Pendapatan Wilayah V
Banggai


WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE
NIP. 19700606 200701 1 030

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI AHDANIAR, SE.M.AP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah V
Banggai

WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE
NIP. 19700606 200701 1 030

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

SRI AHDANIAR, SE.M.AP
NIP. 19830327 200903 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. V Banggai - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. V Banggai	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Dokumen 2 Paket
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. V Banggai - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. V Banggai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan 1 Laporan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. V Banggai - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Dokumen 1 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.953.310	APBD
1. - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.953.310	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.788.681	APBD
2. - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	619.788.681	
Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	80.338.350	APBD
3. Daerah - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.338.350	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 858.080.341	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah V
Banggai



WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE
NIP. 19700606 200701 1 030

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



SRI AHDANIAR, SE.M.AP
NIP. 19830327 200903 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUSNO LASANDRE, SH.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAHYUDIN R. LASIMPALA, SH**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah V
Banggai

WAHYUDIN R. LASIMPALA, SH

NIP. 19700606 200701 1 030

Pihak Pertama,

Kasie PKB dan BBN-KB

RUSNO LASANDRE, SH.


NIP. 19690806 200701 1 038

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. V Banggai	Persentase WP yang terlayani	100%
	- Tersusunnya Laporan Realisasi pembayaran PKB dan BBNKB di UPTB Wil. V Banggai	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB	12 Laporan


KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 260.221.481	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 260.221.481	
TOTAL ANGGARAN Rp.	260.221.481	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah V
Banggai



WAHYUDIN R. LASIMPALA, SH
NIP. 19700606 200701 1 030

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie PKB dan BBN-KB



RUSNO LASANDRE, SH.
NIP. 19690806 200701 1 038

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAPTO K. MAMONTO, SH., M.Si**

Jabatan : Kasie Penagihan dan Penetapan UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah V Banggai

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kasie Penagihan dan Penetapan

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah V
Banggai

WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE
NIP. 19700606 200701 1 030


YAPTO K. MAMONTO, SH., M.Si
NIP. 19841005 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. V Banggai Tersusunnya data Wajib Pajak yang - menunggak PKB dan PAP di UPTB Wil. V Banggai	Persentase WP yang terlayani Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	100% 12 Dokumen


KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 260.221.481	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 260.221.481	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 260.221.481	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah V
Banggai



WAHYUDIN R. LASIMPALA, SE
NIP. 19700606 200701 1 030

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie Penetapan dan Penagihan



YAPTO K. MAMONTO, SH., M.Si
NIP. 19841005 201001 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMELIA KUSUMAWATI LAMAKARATE S.STP., M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI
Banggai Kepulauan

AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.
NIP. 19810830 200012 2 001

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.	858.080.341	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp.	596.550.067	APBD
TOTAL ANGGARAN Rp.	1.454.630.408	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

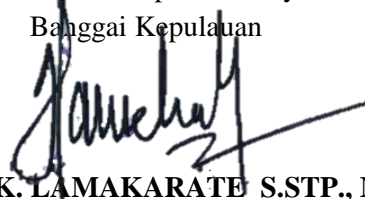


[Signature]

DR. RIFKI ANITA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 196707271986031005

Pihak Pertama

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI
Banggai Kepulauan



AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.
NIP. 198108302000122001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALAMSYAH, SE.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai
Kepulauan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMELIA KUSUMAWATI LAMAKARATE S.STP., M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI
Banggai Kepulauan

AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.

NIP. 19810830 200012 2 001

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

ALAMSYAH, SE.

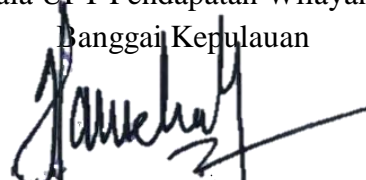
NIP. 19780730 201001 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

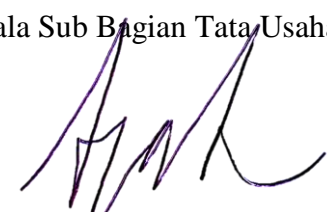
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen 3 Paket
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan 1 Laporan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Laporan 1 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.953.310	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.953.310	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.788.681	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	619.788.681	
Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	80.338.350	APBD
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.338.350	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 858.080.341	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI
Banggai Kepulauan


AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.
NIP. 19810830 200012 2 001

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


ALAMSYAH, SE.
NIP. 19780730 201001 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUKRIN ABD. RAHMAN, SH.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMELIA KUSUMAWATI LAMAKARATE S.STP., M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI
Banggai Kepulauan

Pihak Pertama,
Kasie PKB dan BBN-KB

AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.

NIP. 19810830 200012 2 001

SUKRIN ABD. RAHMAN, SH.

NIP. 19790212 201001 1 026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Persentase WP yang terlayani	100%
-	Tersusunnya Laporan Realisasi pembayaran PKB dan BBNKB di UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB	12 Laporan

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 768.900.067	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 384.450.034	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 768.900.067	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI
Banggai Kepulauan


AMELIA K. HAMAKAKATE S.STP., M.Si.
NIP. 19810830 200012 2 001

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie PKB dan BPN-KB


SUKRIN ABD. RAHMAN, SH.
NIP. 19790212 201001 1 026

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUSTINUS FERNANDO RUNTUKAHU, SE.**

Jabatan : Kasie Penagihan dan Penetapan UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMELIA KUSUMAWATI LAMAKARATE S.STP., M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI
Banggai Kepulauan

AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.
NIP. 19810830 200012 2 001

Pihak Pertama,
Kasie Penagihan dan Penetapan

AGUSTINUS F. RUNTUKAHU, SE.
NIP. 19840804 201503 1 003

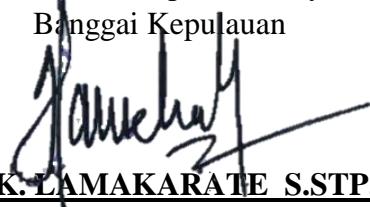
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan Tersusunnya data Wajib Pajak yang - menunggak PKB dan PAP di UPTB Wil. VI Banggai Kepulauan	Persentase WP yang terlayani Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	100% 12 Dokumen

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 298.275.034	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 298.275.034	
TOTAL ANGGARAN Rp.	298.275.034	APBD

Palu, 13 Februari 2024

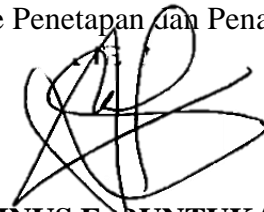
Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VI
Banggai Kepulauan



AMELIA K. LAMAKARATE S.STP., M.Si.

NIP. 19810830 200012 2 001

Pihak Pertama
Kasie Penetapan dan Penagihan



AGUSTINUS F. RUNTUKAHU, SE.

NIP. 19840804 201503 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERAWATI, SE.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII
Tolitoli

ERAWATI, SE.

NIP. 19771219 200801 2 010

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19640727 198603 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTB Wil. VII Toli-toli	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada UPTB Wil. VII Toli-toli	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VII Toli-toli	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 671.522.271	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 634.409.264	APBD
TOTAL ANGGARAN Rp.	1.305.931.535	APBD


Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. NEKLA AZATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Pihak Pertama
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII
Toli-Toli



ERA WATI, SE.
NIP. 19771219 200801 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR HASANAH, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ERAWATI, SE.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII
Tolitoli

ERAWATI, SE.

NIP. 19771219 200801 2 010

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

NUR HASANAH, SE

NIP. 19800618 200804 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. VII Toli-toli - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. VII Toli-toli	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Dokumen 4 Paket
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. VII Toli-toli - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. VII Toli-toli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan 1 Laporan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. VII Toli-toli - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Laporan 5 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Rp. Daerah	190.398.020	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.398.020	
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp. Pemerintahan Daerah	303.694.251	
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.694.251	
3. Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Rp. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.430.000	
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.430.000	
TOTAL ANGGARAN Rp.	671.522.271	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII
Toli-Toli


ERAWATI, SE.

NIP. 19771219 200801 2 010

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


NUR HASANAH, SE

NIP. 19800618 200804 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FANDY ARISYANDI, SH.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ERAWATY, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

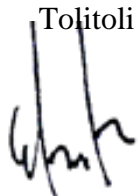
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII
Tolitoli



ERAWATY, SE

NIP. 19771219 200801 2 010

Pihak Pertama,

Kasie PKB dan BBN-KB

FANDY ARISYANDI, SH.

NIP. 19771219 200801 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. VII Toli-toli Tersusunnya Laporan Realisasi pembayaran PKB dan BBNKB di UPTB Wil. VII Toli-toli	Persentase WP yang terlayani Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB	100% 12 Laporan

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 634.409.264	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 317.204.632	
TOTAL ANGGARAN Rp.	634.409.264	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII
Toli-Toli

ERAWATY, SE
NIP. 19771219 200801 2 010

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie PKB dan BBN-KB

FANDY ARISYANDI, SH.
NIP. 19771219 200801 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAJEMIAH, SE., MM**

Jabatan : Kasie Penagihan dan Penetapan UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ERAWATY, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

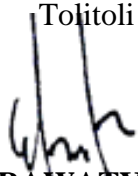
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII
Tolitoli



ERAWATY, SE

NIP. 19771219 200801 2 010

Pihak Pertama,

Kasie Penagihan dan Penetapan



NAJEMIAH, SE., MM

NIP. 19780513 200502 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. VII Toli-toli Tersusunnya data Wajib Pajak yang - menunggak PKB dan PAP di UPTB Wil. VII Toli-toli	Persentase WP yang terlayani Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	100% 12 Dokumen

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 634.409.264	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 317.204.632	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 634.409.264	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VII
Toli-Toli


ERAWATY, SE
NIP. 19771219 200801 2 010

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie Penetapan dan Penagihan


NAJEMIAH, SE., MM
NIP. 19780513 200502 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULKIFLI, S.Sos**
Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII
Buol

ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19800414 200212 1 006

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTB Wil. VIII Buol	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada UPTB Wil. VIII Buol	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. VIII Buol	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. Daerah Provinsi	312.630.097	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp.	485.702.800	
TOTAL ANGGARAN Rp.	798.332.897	APBD

Pihak Kedua

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


L. SRIEKLANITA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19870727 198603 1 005

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII
Buol


ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19800414 200212 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AJIS, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZULKIFLI, S.Sos**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII
B u o l

ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19800414 200212 1 006

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

AJIS, S.Sos

NIP. 19690817 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. VIII Buol Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. VIII Buol	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen 3 Paket
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. VIII Buol Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTB Wil. VIII Buol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan 1 Laporan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum, Perlengkapan dan Kehumasan pada UPTB Wil. VIII Buol Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Laporan 5 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.933.724	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.933.724	
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.927.873	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.927.873	
3. Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	37.768.500	APBD
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.768.500	
TOTAL ANGGARAN Rp.	312.630.097	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

B u o l



ZULFIKLI, S.Sos

NIP. 19800414 200212 1 006



AJIS, S.Sos

NIP. 19690817 200604 1 016

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HUSEN, S.Sos**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZULKIFLI, S.Sos**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII

B u o l

ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19800414 200212 1 006

Pihak Pertama,

Kasie PKB dan BBN-KB

HUSEN, S.Sos

NIP. 19710405 200312 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. VIII Buol	Persentase WP yang terlayani	100%
	- Tersusunnya Laporan Realisasi pembayaran PKB dan BBNKB di UPTB Wil. VIII Buol	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran PKB dan BBNKB	12 Laporan

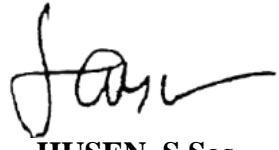
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 485.702.800	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 242.851.400	
TOTAL ANGGARAN Rp.	485.702.800	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII
B u o l


ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19800414 200212 1 006

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie PKB dan BBN-KB


HUSEN, S.Sos

NIP. 19710405 200312 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SABIHA KOROMPOT, SE.**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZULKIFLI, S.Sos**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII

B u o l

ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19800414 200212 1 006

Pihak Pertama,

Kasie Penetapan dan Penagihan

SABIHA KOROMPOT, SE.

NIP. 19850309 201001 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan pada UPTB Wil. VIII Buol Tersusunnya data Wajib Pajak yang menunggak PKB dan PAP di UPTB Wil. VIII Buol	Persentase WP yang terlayani Jumlah Dokumen data Wajib Pajak menunggak PKB dan PAP yang tertagih	100% 12 Dokumen

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 485.702.800	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 242.851.400	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 485.702.800	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah VIII
B u o l


ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19800414 200212 1 006

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie Penagihan dan Penetapan


SABIHA KOROMPOT, SE.
NIP. 19850309 201001 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRIKURNIATY, SP. M.Si.**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-Una

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX
Tojo Una-Una

SRIKURNIATY, SP. M.Si.
NIP. 19771024 201112 2 002

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTB IX Tojo Una-Una	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada UPTB Wil. IX Tojo Una-Una	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada	100%

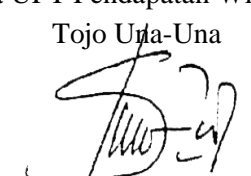
PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. Daerah Provinsi	512.814.224	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp.	652.460.800	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 1.165.275.024	APBD

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



L. SRIKURNIATY, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX
Tojo Una-Una



SRIKURNIATY, SP. M.Si
NIP. 19771024 201112 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RISNA S. MOHAMAD, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-Una
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRIKURNIATY, SP., M.Si**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-Una

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX
Tojo Una-Una

SRIKURNIATY, SP., M.Si
NIP. 19771024 201112 2 002

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

RISNA S. MOHAMAD, S.Sos.
NIP. 19690106 200604 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen 3 Paket
2.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen 1 Laporan
3.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Dokumen 3 Paket

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.949.224	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.949.224	
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.000.000	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.000.000	
3. Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.865.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.865.000	
TOTAL ANGGARAN Rp.	512.814.224	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX
Tojo Una-Una



SRIKURNIATY, SP., M.Si
NIP. 19771024 201112 2 002

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



RISNA S. MOHAMAD, S.Sos.
NIP. 19690106 200604 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAMIDA SUAIB, SE., MM**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-Una

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRIKURNIATY, SP., M.Si**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-Una

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX
Tojo Una-Una

SRIKURNIATY, SP., M.Si
NIP. 19771024 201112 2 002

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kasie PKB dan BBN-KB

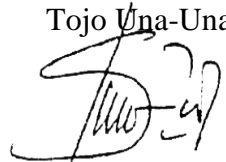
NAMIDA SUAIB, SE., MM
NIP. 19730713 200604 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen 1 Dokumen SSPD

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 652.460.800	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 326.230.400	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 652.460.800	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX
Tojo Una-Una



SRIKURNIATY, SP., M.Si
NIP. 19771024 201112 2 002

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama
Kasie PKB dan BBN-KB



NAMIDA SUAIB, SE., MM
NIP. 19730713 200604 2 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAMSUL BAHRI GANDALI, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-una
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRIKURNIATY, SP., M.Si**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-una
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX
Tojo Una-una

SRIKURNIATY, SP., M.Si
NIP. 19771024 201112 2 002

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kasie Penetapan dan Penagihan

SYAMSUL BAHRI GANDALI, S.Sos., M.Si
NIP. 19690919 199010 1 003

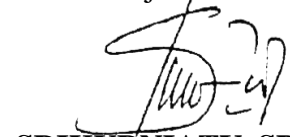
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Dokumen
	- Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 652.460.800	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 326.230.400	
TOTAL ANGGARAN Rp.	652.460.800	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah IX
Tojo Una-Una



SRIKURNIATY, SP., M.Si
NIP. 19771024 201112 2 002

Pihak Pertama
Kasie Penetapan dan Penagihan



SYAMSUL BAHRI GANDALI, S.Sos., M.Si
NIP. 19690919 199010 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARMAIN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah X
Donggala

HARMAIN, SE., MM

NIP. 19661231 199503 1 019

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTB X Donggala	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada UPTB Wil. X Donggala	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. X Donggala	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. Daerah Provinsi	726.246.577	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp.	425.389.054	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 1.151.635.631	APBD

Pihak Kedua

Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

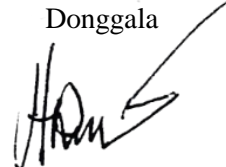


RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 196707271986031005

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama

Kepala UPT Pendapatan Wilayah X
Donggala



HARMAIN, SE., MM
NIP. 196612311995031019

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAISAL ANSHARI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARMAIN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah X
Donggala

HARMAIN, SE., MM
NIP. 19661231 199503 1 019

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

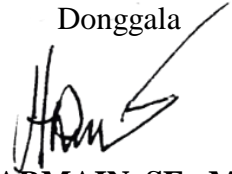
FAISAL ANSHARI, S.Sos
NIP. 19700622 200701 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen 5 Paket
2.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan 1 Laporan
3.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Dokumen 4 Paket

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Rp. Daerah	448.522.650	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	448.522.650	
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Rp. Urusan Pemerintahan Daerah	155.473.927	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.473.927	
3. Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Rp. Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.250.000	APBD
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.250.000	
TOTAL ANGGARAN Rp.	726.246.577	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah X
Donggala


HARMAIN, SE., MM
NIP. 19661231 199503 1 019

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


FAISAL ANSHARI, S.Sos
NIP. 19700622 200701 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANSYAR BANGKO, S.Sos.**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARMAIN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah X Donggala

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah X
Donggala

HARMAIN, SE., MM
NIP. 19661231 199503 1 019

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kasie PKB dan BBN-KB

ANSYAR BANGKO, S.Sos.
NIP. 19841208 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Dokumen
	- Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah Rp.	425.389.054	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Rp.	212.694.527	
TOTAL ANGGARAN Rp.	425.389.054	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah X
Donggala


HARMAIN, SE., MM
NIP. 19661231 199503 1 019

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie PKB dan BBN-KB


ANSYAR BANGKO, S.Sos.
NIP. 19841208 200604 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARMADANI ALI, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kasie Penetapan dan Penagihan UPT Pendapatan Wilayah X Donggala
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARMAIN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah X Donggala
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah X
Donggala

HARMAIN, SE., MM
NIP. 19661231 199503 1 019

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kasie Penetapan dan Penagihan

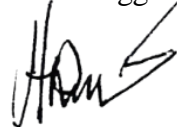
ARMADANI ALI, S.STP., M.Si
NIP. 19810705 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen 1 Dokumen SSPD

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 425.389.054	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 212.694.527	
TOTAL ANGGARAN	Rp. 425.389.054	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah X
Donggala



HARMAIN, SE., MM
NIP. 19661231 199503 1 019

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie Penetapan dan Penagihan



ARMADANI ALI, S.STP., M.Si
NIP. 19810705 200112 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,

Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI
Sigi

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Dr. Hj. AGUSTINA D. PETTALOLO, SE., MT
NIP. 19730802 200012 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTB XI Sigi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah pada UPTB Wil. XI Sigi	Persentase Realisasi Pajak Daerah pada UPTB Wil. XI Sigi	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.	952.741.350	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp.	431.260.000	
TOTAL ANGGARAN Rp.	1.384.001.350	APBD

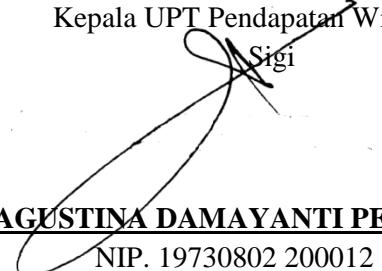
Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. NEKLA NATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Pihak Pertama
Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI
Sigi



Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT
NIP. 19730802 200012 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI NING REJEKI, SE., MM**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI

Sigi

Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE, MT

NIP. 19730802 200012 2 004

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

SRI NING REJEKI, SE, MM

NIP. 19720702 200012 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen 4 Paket
2.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan 1 Laporan
3.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Dokumen 4 Paket

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. Provinsi	952.741.350	APBD
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.	215.979.600	
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.	215.979.600	
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.	674.031.750	
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.	674.031.750	
3. Kegiatan Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Rp. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.730.000	
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.	62.730.000	
TOTAL ANGGARAN Rp.	952.741.350	APBD

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI
Sigi

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dr.Hj.AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE.,MT
NIP. 19730802 200012 2 004

SRI NING REJEKI, SE., MM
NIP. 19720702 200012 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURSAM ARDIYANSYAH, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kasie PKB dan BBN-KB UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kasie PKB dan BBN-KB

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI
S i g i

Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE, MT
NIP. 19730802 200012 2 004

NURSAM ARDIYANSYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19830407 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen 1 Dokumen SSPD

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 431.260.000	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 215.630.000	
TOTAL ANGGARAN Rp.	431.260.000	APBD

Palu, Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI
Sigi

Pihak Pertama
Kasie PKB dan BBN-KB

Dr.Hj.AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO,
NIP. 19730802 200012 2 004

NURSAM ARDIYANSYAH, S.Sos., M.Si
NIP. 19830407 201001 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD RIO, SE**

Jabatan : Kasie Penagihan dan Penetapan UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE., MT**

Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI
S i g i

Dr. Hj. AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO, SE, MT
NIP. 19730802 200012 2 004

Palu, 13 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kasie Penagihan dan Penetapan

LUHUR, S.Sos. MM.
NIP. 19750214 200701 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen 1 Dokumen SSPD

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 431.260.000	APBD
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 215.630.000	
TOTAL ANGGARAN Rp.	431.260.000	APBD

Pihak Kedua
Kepala UPT Pendapatan Wilayah XI
Sigi

Dr.Hj.AGUSTINA DAMAYANTI PETTALOLO.
NIP. 19730802 200012 2 004

Palu, Februari 2024
Pihak Pertama
Kasie Penagihan dan Penetapan

LUHUR, S.Sos. MM
NIP. 19750214 200701 1 008